



DPUPR LKJIP

2025

JL. RADEN WIJAYA NO. 60 - MOJOKERTO

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sekaligus wujud komitmen dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan, dimana pada awal tahun pelaksanaan kinerja masih mengacu pada Renstra DPUPR 2021–2025, dan selanjutnya dilakukan penyesuaian seiring ditetapkan Renstra DPUPR 2025–2029 melalui Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Kondisi tersebut disajikan secara transparan dalam LKjIP agar pengukuran kinerja tetap berkesinambungan dan akuntabel.

LKjIP ini disusun dengan pendekatan kinerja berbasis hasil, yang mengaitkan capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan DPUPR Tahun 2025 telah mengarah pada penerapan prinsip value for money, dengan capaian kinerja yang umumnya baik serta tingkat efisiensi anggaran yang terjaga.

Diharapkan LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya, sekaligus mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan nilai SAKIP secara berkelanjutan.

Mojokerto, 02 Februari 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO



YUNI LAILI FAIZAH, S.T., M.E.
NIP 197706072001122005



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyusun 2 Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun setelah penetapan periode perencanaan baru 2025-2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 10 sasaran strategis dengan total 10 indikator kinerja dan 10 target kinerja yang harus dicapai, sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 10 sasaran strategis dan dengan 11 indikator kinerja dan 11 target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 5 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 6 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 4 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	81%	80,93%	99,91%
2	Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%	100%	100,00%
3	Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	95,50%	96,32%	100,86%
4	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	10%	10,90%	109,00%
5	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	99,91%	99,91%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase	21%	21,05%	100,24%
7	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio kepatuhan PBG dan SLF	48%	48%	100,00%
8	Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	84%	85%	101,06%
9	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator /teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	52%	61%	116,73%
10	Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	100%	100%	100,00%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	01.01	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,50 (A)	83,54 (A)	101,26%
		01.02	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	88,50%	87,77%	99,18%

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		01.03	Indeks Profesionalitas ASN	83,5 (Tinggi)	84,15 (Tinggi)	100,78%
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 Inovasi	2 Inovasi	100,00%

2. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100,00%	100,00%	100,00%
2	Meningkatnya akses terhadap air minum (SPAM)	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum (SPAM)	95,50%	96,32%	100,86%
3	Meningkatnya penyediaan sarana pengelolaan sampah yang sesuai ketentuan	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	10,00%	10,90%	109,00%
4	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100,00%	99,91%	99,91%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan banjir di perkotaan dan lingkungan	Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase dengan kondisi baik	21,00%	21,05%	100,24%
6	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio Bangunan Gedung kondisi baik dan laik fungsi	11,00%	11,00%	100,00%
7	Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	84,00%	84,89%	101,06%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
8	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator /teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	52,00%	60,70%	116,73%
9	Meningkatnya kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang	Persentase pembangunan daerah yang selaras dengan RTRW	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase wilayah kecamatan yang telah dilengkapi dengan RDTR	5,56%	5,56%	100,00%
10	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,5	83,54	101,26%

Kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto, tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar RpRp. 221.980.403.363,36 atau 87,77% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 252.902.576.872,00.

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	v
 BAB I PENDAHULUAN	 9
I.1 Latar Belakang.....	9
I.2 Gambaran Umum	10
I.3 Isu-isu Strategis	12
I.4 Sistematika Penulisan.....	14
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	 16
II.1 Penjenjangan Strategis	16
II.2 Indikator Kinerja Utama	44
II.3 Perjanjian Kinerja.....	49
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 54
III.1 Pengukuran Kinerja	54
III.2 Analisis Kinerja	58
III.3 Prestasi Kinerja Lainnya	81
III.4 Akuntabilitas Anggaran	105
 BAB IV PENUTUP.....	 114
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh anggaran negara maupun daerah.

Kewajiban penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara normatif diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Selanjutnya, ketentuan teknis penyusunan LKjIP diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam menyusun laporan kinerja secara sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen yang memuat ikhtisar capaian kinerja suatu instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran, yang disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. LKjIP tidak hanya menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja, tetapi juga menggambarkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, permasalahan yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang dilakukan. Dengan demikian, LKjIP berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja sekaligus sarana komunikasi kinerja kepada pimpinan, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

Proses penyusunan LKjIP dilakukan secara berjenjang dan terintegrasi, dimulai dari penetapan perencanaan kinerja tahunan melalui Perjanjian Kinerja, pengumpulan dan pengolahan data capaian kinerja dari seluruh unit kerja, pengukuran dan analisis tingkat pencapaian indikator kinerja, hingga penyusunan laporan kinerja yang direviu

oleh aparat pengawasan internal pemerintah. Proses ini menuntut konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja agar informasi yang disajikan mencerminkan kondisi kinerja yang sesungguhnya.

LKjIP memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik jangka menengah maupun tahunan. Indikator kinerja dan sasaran yang dilaporkan dalam LKjIP bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), serta dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Perjanjian Kinerja. Oleh karena itu, LKjIP menjadi alat untuk menilai tingkat konsistensi dan keselarasan antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan.

Lebih lanjut, LKjIP berperan penting sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan perencanaan kinerja pada periode berikutnya. Hasil evaluasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, dan faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, LKjIP tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

I.2 Gambaran Umum

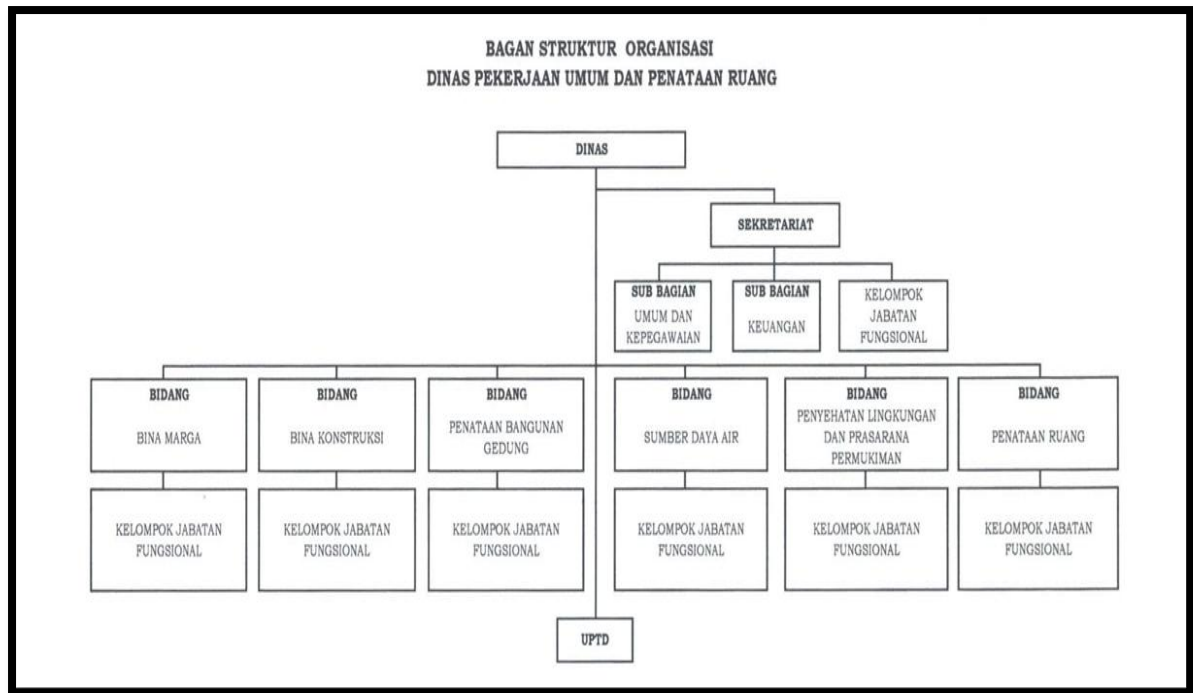
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto merupakan perangkat daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Secara administratif, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto berkedudukan di wilayah Kabupaten Mojokerto dan melaksanakan tugas serta fungsinya dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, berdaya guna, dan sesuai dengan rencana tata ruang.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto didukung oleh sumber daya organisasi yang mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta aset pendukung lainnya. Sumber daya manusia yang dimiliki terdiri dari aparatur sipil negara dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang beragam, baik teknis maupun administratif, yang

tersebar pada sekretariat, bidang teknis, dan unit pelaksana teknis daerah. Ketersediaan sumber daya manusia tersebut menjadi faktor penting dalam menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur. Selain itu, perangkat daerah ini juga didukung oleh aset berupa gedung perkantoran, peralatan kerja, kendaraan operasional, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan dan pelayanan kepada masyarakat, tanpa dirinci per komponen dalam laporan ini.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 79 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto, perangkat daerah ini mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pembinaan dan pengawasan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto terdiri atas Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretariat dan beberapa bidang teknis sesuai dengan ruang lingkup urusan yang ditangani, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional di wilayah kerja tertentu. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, umum, dan pelaporan kinerja, sedangkan bidang-bidang teknis melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program serta kegiatan pembangunan infrastruktur sesuai dengan bidang tugas masing-masing.



Gambar 1 Struktur Organisasi

Dengan dukungan organisasi, sumber daya, dan struktur kelembagaan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang terintegrasi, berwawasan lingkungan, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

I.3 Isu-isu Strategis

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2025 menghadapi berbagai isu strategis yang berpengaruh terhadap capaian kinerja perangkat daerah serta keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Identifikasi isu strategis ini disusun dengan memperhatikan tingkat kinerja pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, serta dinamika kebijakan pembangunan daerah dan nasional sebagaimana dirumuskan dalam dokumen perencanaan, khususnya RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.

Dari sisi tingkat kinerja pelayanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah berupaya memberikan pelayanan publik yang berkaitan dengan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air, air minum, sanitasi,

drainase, bangunan gedung, serta penataan ruang. Secara umum, capaian indikator kinerja menunjukkan tren positif, terutama pada indikator yang berkaitan dengan kemantapan jalan, layanan irigasi, dan akses air minum. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal kritis dalam pelayanan perangkat daerah, antara lain keterbatasan cakupan layanan infrastruktur pada wilayah tertentu, kesenjangan kualitas infrastruktur antarwilayah, serta belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan minimal pada beberapa subsektor, khususnya pengelolaan persampahan, sanitasi, dan drainase lingkungan.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menghadapi sejumlah permasalahan dan hambatan. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan kapasitas fiskal daerah yang berdampak pada prioritas program dan kegiatan, keterbatasan sumber daya manusia teknis yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai standar jasa konstruksi, serta kompleksitas permasalahan teknis di lapangan yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, perubahan iklim, dan dinamika pemanfaatan ruang. Selain itu, proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga menghadapi tantangan berupa kebutuhan penyesuaian kebijakan akibat perubahan dokumen perencanaan jangka menengah, termasuk transisi menuju Renstra Perangkat Daerah periode 2025–2029.

Permasalahan dan hambatan tersebut memiliki implikasi langsung terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, khususnya misi yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Keterbatasan cakupan layanan infrastruktur dasar dapat mempengaruhi percepatan pembangunan wilayah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta daya saing daerah. Di tingkat yang lebih luas, kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga berkontribusi terhadap pencapaian target program nasional dan global, seperti pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama tujuan yang berkaitan dengan infrastruktur, air bersih dan sanitasi, permukiman berkelanjutan, serta ketahanan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat pula peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah. Peluang

tersebut antara lain dukungan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam pengembangan infrastruktur strategis, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, penguatan kolaborasi dengan perangkat daerah lain dan pemangku kepentingan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Selain itu, penetapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 membuka ruang untuk penyelarasan kembali sasaran, indikator, dan program pembangunan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah dan dinamika pembangunan ke depan.

Berdasarkan kondisi tersebut, isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan antara lain: perlunya penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan prioritas wilayah; peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya tenaga teknis dan fungsional; optimalisasi pemenuhan standar pelayanan minimal dan NSPK pada seluruh subsektor pekerjaan umum dan penataan ruang; serta penguatan tata kelola pembangunan infrastruktur yang selaras dengan rencana tata ruang dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Isu-isu strategis ini menjadi rekomendasi dan catatan penting bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja, serta sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun-tahun selanjutnya.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya LKj; profil yang meliputi gambaran umum, struktur organisasi, tugas, dan fungsinya; isu-isu strategis; serta sistematika penulisan LKj.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan perencanaan strategis dan perjanjian kinerja sebagai dasar pelaporan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penjelasan atas capaian dimaksud dengan data-data pendukung. Selain itu, juga menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi tantangan dan hambatannya. Realisasi anggaran juga disajikan dalam bab ini.

BAB IV PENUTUP

Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja serta harapan dan upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan dalam rangka peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Penjenjangan Strategis

Periode perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2026 merupakan fase penting dalam penguatan fondasi pembangunan infrastruktur daerah. Selama periode tersebut, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar, penguatan layanan sumber daya air, peningkatan cakupan air minum dan sanitasi, pengendalian pemanfaatan ruang, serta penguatan tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi dan kinerja perangkat daerah.

Visi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, yaitu ” **Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia** ” dan Misi Kabupaten Mojokerto yaitu :

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan.
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Misi yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto adalah **Misi 4** yaitu ” **Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan**”. Adapun Tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi serta Urusan Pemerintahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto adalah “Mewujudkan Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan”.

Dalam menentukan perencanaan kinerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto mengacu rencana strategis dan berdasar pada tujuan

yang merupakan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 yaitu “Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung” dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan.

Penjenjangan strategis (cascading) Renstra 2021–2026 disusun dengan prinsip keterkaitan yang jelas antara tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, program, kegiatan, hingga subkegiatan dan indikator individu. Struktur tersebut memastikan bahwa setiap intervensi program memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis dan mendukung indikator kinerja utama perangkat daerah.

Memasuki Tahun 2025, terjadi fase transisi perencanaan yang unik, karena tahun tersebut menjadi titik temu antara akhir periode Renstra 2021–2026 dan awal implementasi Renstra baru 2025–2029. Oleh karena itu, penjabaran penjenjangan strategis Renstra 2021–2026 perlu dipahami bukan sebagai struktur yang terpisah, melainkan sebagai baseline dan fondasi logis bagi penyusunan serta implementasi Renstra 2025–2029.

Secara substantif, terdapat kesinambungan arah kebijakan antara kedua dokumen perencanaan tersebut. Sasaran yang berkaitan dengan kemantapan jalan, pengelolaan sumber daya air, peningkatan akses SPAM, pengolahan air limbah domestik, pengendalian banjir, penataan bangunan gedung, penguatan jasa konstruksi, kesesuaian pemanfaatan ruang, serta tata kelola kinerja perangkat daerah tetap dipertahankan sebagai isu strategis utama. Perbedaannya terletak pada penajaman fokus, penyesuaian target, dan penguatan pendekatan berbasis risiko serta efisiensi pada periode Renstra 2025–2029.

Penjenjangan strategis Renstra 2021–2026 juga menjadi dasar evaluatif untuk:

1. Mengidentifikasi indikator yang telah mencapai atau mendekati target akhir sebagai baseline periode baru;
2. Menentukan indikator yang masih memiliki gap terhadap target jangka menengah sehingga memerlukan akselerasi pada Renstra 2025–2029;
3. Menilai efektivitas struktur program dan kegiatan sebagai referensi penyempurnaan desain intervensi pada periode berikutnya;
4. Memastikan kesinambungan antara dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan Renstra perangkat daerah secara konsisten dan terukur.

Dengan demikian, penjabaran penjenjangan strategis Renstra 2021–2026 dalam dokumen ini dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan linier antara perencanaan lama dan perencanaan baru, sekaligus menjadi bukti bahwa proses transisi dilakukan secara sistematis, terukur, dan tidak menimbulkan diskontinuitas kebijakan.

Selanjutnya, uraian mengenai struktur penjenjangan strategis Renstra 2021–2026 disajikan untuk memperlihatkan keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator, program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi fondasi logis penyusunan Renstra 2025–2029. Berikut merupakan penjenjangan strategis renstra 2021-2026 :

Tabel II.1 Matriks Penjenjangan Strategis 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung			Persentase infrastruktur kondisi baik	73,88%
	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A
			Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	87%
			Indeks profesionalitas ASN	80
	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah		Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase target Kinerja OPD yang terpenuhi	100%

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersusun	100%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	6 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah kegiatan yang terkoordinasi dan dapat dikendalikan pelaksanaannya	21 Kegiatan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja yang tersusun	6 Dokumen
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN terbayar gaji dan tunjangannya	100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terbayar gaji dan tunjangannya	244 ASN
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset OPD yang tercatat dan dilaporkan	100%
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pendataan aset OPD	1 dokumen
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksana	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 unit
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang disediakan	5000 dos
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	14 Jenis
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan per bulan	12 bulan
		Penyediaan Bahan/Material	jenis alat tulis kantor yang disediakan	44 Jenis

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar dan dalam daerah yang terbiayai	600 oh
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening telpon, internet, listrik terbayar per bulan	1 Tahun
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72 Tenaga Kerja yang terbayar gajinya per bulan	1 Tahun
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara	87%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	20 Unit
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat berat yang dipelihara	50 unit
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	70 buah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	3 gedung
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	230 kali
	Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi (Primer, Sekunder, Tersier) dalam kondisi baik	80%
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	Persentase SDA terkelola	84%

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		<i>pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen disusun	1 Dokumen
		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah titik yang terpelihara	3 Titik
		Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan aset sumber daya air yang tersusun	2 Dokumen
		<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase jaringan irigasi yang dikelola (dipelihara/direhabilitasi) dari total jaringan irigasi kewenangan</i>	<i>75%</i>
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Volume JI yang direhabilitasi	25 JI
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi terpelihara	5 UPTD
	Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	89,15%
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	346012 KK

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
			melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui kegiatan penyediaan SPAM	1930 KK
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen disusun	5 Dokumen
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah tangga terlayani SPAM (SR)	548 SR
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukab	10 Kali
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah tangga terlayani SPAM (SR)	1930 SR
	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah		Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	28%
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	18%
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang disediakan TPS/TPST/TPS3R	14 Desa
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPS dibangun	14 TPS
	Meningkatnya akses layanan		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan	89,34%

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
	pengolahan air limbah domestik		pengolahan air limbah domestik	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	283955
		<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar</i>	32%
		Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah sub sistem pengolahan setempat dibangun	300 unit
		Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sosialisasi dilaksanakan	10 Kali
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase	21%
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	18%
		<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Panjang Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai</i>	5650 m
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase dibangun	2175 m
		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase ditingkatkan	1375 m
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang sistem drainase yang dilakukan OP	300 m

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase dibangun	1450 m
		Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase ditingkatkan	700 m
	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung		Rasio kepatuhan PBG dan SLF	13%
		Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan gedung instansi pemerintah yang laik fungsi	-
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung instansi pemerintah kondisi baik	96%
		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Tim Terbentuk dan tercukupi operasionalnya	1 Tim
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung terbangun	11 Gedung
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase bangunan gedung sesuai RTBL	10%
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengajuan dan survey lokasi sempadan jalan	35 Pengajuan
		Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	jumlah bulan operasional tim survey lokasi sempadan jalan	12 bulan

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
			/ pengajuan yang dibiayai	
	Meningkatnya kemantapan jalan		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	84,20%
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	61%
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik	635 km
		Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah ruas jalan yang dilebarkan	16 Ruas Jalan
		Rekonstruksi Jalan	Jumlah ruas jalan yang direkonstruksi	6 Ruas Jalan
		Rehabilitasi Jalan	Jumlah ruas jalan yang direhabilitasi	2 Ruas Jalan
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah ruas jalan yang dipelihara berkala	2 Ruas Jalan
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah panjang / Luas ruas jalan kondisi rusak ringan yang terpelihara	27.000 m2
		Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	5 Jembatan
		Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang dilebarkan	8 Jembatan
		Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi	2 Jembatan
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan kondisi rusak ringan yang terpelihara	10 Jembatan
	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi		Rasio tenaga operator/teknisi/anal is yang memiliki sertifikat kompetensi	36,26%
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Badan Usaha yang memiliki tenaga kerja konstruksi bersertifikat terampil	8%
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/anal is	5 kali
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil bersertifikat	50 Org / Ketrampilan
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Informasi jasa konstruksi	10 Informasi
		Penyelenggaraan Pelatihan untuk	Jumlah Pelatihan dilakukan	6 kali

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI		
		Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah dokumen data dan informasi tenaga kerja dan Badan Usaha yang disusun	1 dokumen
	Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang		Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	100%
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	100%
		<i>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase dokumen tata ruang yang tersusun</i>	<i>100%</i>
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen materi teknis disusun	5 Dokumen
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah kebijakan dalam pelaksanaan penataan ruang yang ditetapkan	10 Kebijakan
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah kebijakan dalam pelaksanaan penataan ruang yang disosialisasikan	10 kebijakan
		<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen tata ruang</i>	<i>100%</i>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya	50 Rekomendasi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah informasi tata ruang yang tersedia	5 Informasi
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permintaan informasi tata ruang yang tertangani	100%
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Bulan yang tercukupi fasilitasi dan koordinasi penataan ruang	12 bulan

Lalu, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2025-2029 memiliki 1 visi yang didukung dengan 4 misi. Visi Kabupaten Mojokerto adalah

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur”

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kabupaten Mojokerto memiliki 4 misi yang perlu dilaksanakan, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman masyarakat.
3. Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Visi Kabupaten Mojokerto sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, termasuk pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang mengampu misi ke 4 kepala daerah yang berkaitan dengan penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur serta penataan ruang yang tertib dan berkelanjutan.

Selanjutnya, misi kepala daerah tersebut dijabarkan ke dalam tujuan pembangunan kabupaten yang menjadi arah kebijakan pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Tujuan kabupaten tersebut kemudian diturunkan menjadi sasaran kabupaten yang sekaligus menjadi tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai perangkat daerah pengampu urusan.

Dalam rangka mencapai tujuan perangkat daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menetapkan sasaran perangkat daerah yang bersifat operasional dan terukur. Sasaran perangkat daerah tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program perangkat daerah yang selaras dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki.

Program perangkat daerah selanjutnya dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto. Kegiatan dan sub kegiatan tersebut dirancang untuk menghasilkan output yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah dan tujuan pembangunan kabupaten. Dengan demikian, seluruh rangkaian perencanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah disusun secara berjenjang dan terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut kami sajikan tabel penjenjangan strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

Tabel II.2 Matriks Penjenjangan Strategis 2025-2029

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi baik			Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	71,03

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Meningkatnya ketersediaan dan kontinuitas suplai air irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	100
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi	%	68
		Terbangunnya infrastruktur irigasi yang fungsional			
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan SDA yang terlaksana	kegiatan	3
		Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Unit	2
		Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1
		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	3
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	1
		Terbangunnya dan berfungsinya jaringan irigasi permukaan dan tanah			

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan irigasi yang terlaksana	kegiatan	11
		Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	titik	0
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	0,3
		Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	unit	2
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	2
		Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	unit	1
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	1,8
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	dokumen	3
	Meningkatnya akses terhadap air minum (SPAM)	Terpenuhinya kebutuhan dasar air minum masyarakat	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum (SPAM)	%	95,5
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga memperoleh akses air minum aman	%	95,5
		Tersedianya infrastruktur SPAM yang fungsional dan merata			

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem SPAM yang dikembangkan	sistem	2
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	orang	0
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	5
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	0
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	10
	Meningkatnya penyediaan sarana pengelolaan sampah yang sesuai ketentuan	Lingkungan bersih dan berkelanjutan	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	%	10
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase desa yang memiliki sarana pengelolaan sampah sesuai standar	%	10
		Terbangunnya sarana TPS3R dan TPST			

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pengelolaan sampah yang dibangun dan dikelola	unit	2
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	0
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Ton/hari	0,5
	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Terjaganya kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan SPAL yang layak	%	100
		Tersedianya layanan SPAL			
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit layanan pengolahan air limbah domestik yang dibangun dan beroperasi	unit	20
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	M ³ /Hari	40
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	50

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	rumah tangga	0
	Meningkatnya kualitas pengelolaan banjir di perkotaan dan lingkungan	Berkurangnya genangan dan banjir di kawasan permukiman	Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase dengan kondisi baik	%	21
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase kawasan dengan sistem drainase yang berfungsi baik	%	21
		Terbangunnya dan terpeliharanya sistem drainase kawasan			
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang dibangun dan dipelihara	meter	3000
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Meter	700
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Meter	300
		Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Lingkungan	2
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	Dokumen	6

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
			Drainase Lingkungan yang disusun		
		Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Perkotaan	1
		Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan	0
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	1
	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Terwujudnya bangunan aman dan berfungsi sesuai peruntukannya	Rasio Bangunan Gedung kondisi baik dan laik fungsi	%	11
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang memiliki PBG dan SLF	%	11
		Terselenggaranya pembangunan gedung dan Terpenuhinya PBG dan SLF bangunan			
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan yang memperoleh IMB dan SLF	unit	200
		Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis	3

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Orang	90
		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	200
		Terwujudnya bangunan aman dan berfungsi sesuai peruntukannya			
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penataan bangunan dan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan	%	100
		Penataan bangunan gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota			

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	penyelenggara bangunan gedung	50
		Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	50
	Meningkatnya kemantapan jalan	Meningkatnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	84
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase peningkatan jalan mantap terhadap total jalan kabupaten	%	84
		Jalan kabupaten dalam kondisi mantap meningkat			
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan/jembatan yang ditangani sesuai standar	km	56,61
		Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Dokumen	2
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	17
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	km	5,09
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	km	21,88

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	km	8,89
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	jembatan	7
		Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	meter	2
		Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	meter	4
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	1.166,39
		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	km	0,75
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	km	20
		Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan	meter	0
	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Meningkatnya profesionalitas SDM jasa konstruksi	Rasio tenaga operator /teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	52
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase peningkatan SDM jasa konstruksi bersertifikat	%	52
		Terlaksananya pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi			
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelatihan tenaga terampil konstruksi yang dilaksanakan	kali	2
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang	Orang	50

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
			Difasilitasi Sertifikasi		
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	5
		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analisis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analisis yang Dilatih	Orang	50
		Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi			
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang diselenggarakan	sistem informasi	1
		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	1
		Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan Informasi	2
		Terselenggaranya pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi			
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah kegiatan pengawasan dan evaluasi jasa konstruksi yang dilaksanakan	kegiatan	2
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	80
		Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan , dan Tertib	Lembaga	50

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
			Pemanfaatan Produk		
	Meningkatnya kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang		Persentase pembangunan daerah yang selaras dengan RTRW	%	100
		Meningkatnya kepatuhan pembangunan terhadap tata ruang	Persentase wilayah kecamatan yang telah dilengkapi dengan RDTR	%	2
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW dan RDTR	%	100
		Terbitnya dokumen RDTR di wilayah prioritas			
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW/RDTR yang ditetapkan atau difasilitasi	dokumen	2
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	dokumen	1
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	dokumen	2
		Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	dokumen	1
		Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	dokumen	2
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-	Laporan	18

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
			undangan bidang penataan ruang.		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi perencanaan tata ruang yang dilaksanakan	Kali	1
		Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	Peta	2
		Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	dokumen	2
		Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KKPR yang diberikan sesuai ketentuan waktu	%	100
		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	50
		Terselenggaranya pengendalian dan pemanfaatan ruang daerah			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	kegiatan	15
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	dokumen	50
		Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	dokumen	30

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan	0
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	82,5
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase target kinerja perangkat daerah tercapai	%	100
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan evaluasi kinerja yang disusun	dokumen	9
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran serta laporan realisasi	laporan	12
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	202

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	dokumen	12
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	12
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan barang administrasi dan dokumen pendukung kantor	paket	6
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	180
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit kendaraan dan alat penunjang operasional yang disediakan	unit	7

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	6
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi dan pelayanan umum kantor	laporan	24
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kendaraan, alat, peralatan, dan bangunan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	unit	36
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	17
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1

II.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto merupakan tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKU disusun dan ditetapkan sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menjadi dasar dalam pengukuran serta evaluasi kinerja perangkat daerah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah. Indikator kinerja utama dirumuskan pada level tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan mempertimbangkan relevansi indikator terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah serta keterkaitannya dengan indikator kinerja daerah.

Indikator kinerja utama tersebut mencerminkan kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, antara lain terkait dengan kondisi dan kemantapan infrastruktur, pengelolaan sumber daya air, penyediaan layanan air minum dan sanitasi, sistem drainase, penataan bangunan gedung, penyelenggaraan jasa konstruksi, serta kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang.

Untuk menjamin keseragaman pemahaman dan konsistensi pengukuran, setiap indikator kinerja utama dilengkapi dengan formulasi perhitungan, definisi atau penjelasan indikator, serta sumber data yang digunakan. Rincian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto disajikan dalam Tabel Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja, serta penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut kami sajikan tabel Indikator Kinerja Utama Periode 2021-2026 dan 2025-2029 :

Tabel II.3 Indikator Kinerja Utama Periode 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air minum dan bangunan gedung	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	Persentase Jalan, Jembatan, Irigasi, Sanitasi, Air Minum, Bangunan Gedung Kondisi Baik / 6 x 100	Data Dinas PUPR
2	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP perangkat daerah	Laporan Sekretariat
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	(Jumlah anggaran yang terrealisasi / Jumlah anggaran keseluruhan) x 100%	Laporan Sekretariat
		Indeks profesionalitas ASN	Nilai indeks profesionalitas ASN	Laporan Sekretariat (BKPSDM)
3	Optimasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terrealisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		Laporan Sekretariat
4	Meningkatkan pengelolaan	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota	(Luas jaringan irigasi yang dibangun, direhabilitasi, dipelihara / Luas daerah	Laporan Bidang SDA (Data Irigasi)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
	infrastruktur sumber daya air	yang dilayani jaringan irigasi	irigasi kewenangan kab/kota) x 100%	
5	Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	(Jumlah masyarakat yang memiliki akses melalui SPAM / Total rumah tangga di kabupaten/kota) x 100%	Laporan Bidang PLPP (Data SPAM)
6	Meningkatnya ketersediaan sarana persampahan	Persentase desa yang memiliki TPS/TPS3R	(Jumlah TPS/TPS3R yang tersedia / Jumlah desa di kabupaten) x 100%	Laporan Bidang PLPP (Data TPS3R)
7	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang memiliki akses layanan	(Jumlah rumah yang memiliki akses ke IPAL / Total rumah tangga) x 100%	Laporan Bidang PLPP (Data SPAL)
8	Meningkatnya pengelolaan sistem drainase	Persentase perkotaan yang memiliki sistem drainase	(Panjang drainase tersedia / Total kebutuhan drainase di kabupaten/kota) x 100%	Laporan Bidang PLPP (Data Drainase)
9	Meningkatnya penataan bangunan dan lingkungan	Rasio kepatuhan pemanfaatan IMB	(Jumlah IMB yang sesuai peruntukannya / Jumlah IMB) x 100%	Laporan Bidang PBG (Data Bangunan Gedung)
10	Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat kemantapan jalan di kabupaten	(Panjang jalan yang mantap / Total panjang jalan kabupaten) x 100%	Laporan Bidang BM (Data Jalan)
11	Meningkatnya kapasitas jasa konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi dengan sertifikasi	(Jumlah tenaga kerja bersertifikasi / Total	Laporan Bidang BIKON (Data

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
			kebutuhan tenaga kerja konstruksi) x 100%	TKK Jasa Konstruksi)
12	Mempertahankan kesesuaian pembangunan dengan tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap rencana tata ruang	(Jumlah kegiatan sesuai rencana / Total jumlah kegiatan) x 100%	Laporan Bidang Penataan Ruang

Tabel II.4 Indikator Kinerja Utama Periode 2025-2029

No	Kinerja	Indikator	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Sumber Data
1	Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi baik	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	Definisi : proporsi infrastruktur daerah yang berada dalam kondisi baik dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kontribusi relatif dari tiap jenis infrastruktur. Formulasi : $\text{Persentase Infrastruktur Kondisi Baik (Ik)} = (G1 \times W1) + (G2 \times W2) + \dots + (Gn \times Wn)$ Keterangan : • Gi : besaran infrastruktur kondisi baik/layak (sesuai standar tiap komponen). • Wi : bobot komponen i (desimal), Jumlah Wi=1 • N : jumlah jenis infrastruktur yang dinilai	Survei teknis kondisi infrastruktur
2	Meningkatnya pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Definisi: Luas area irigasi yang berfungsi dibandingkan total luas daerah irigasi kewenangan kabupaten. Formula: $(\text{Luas irigasi berfungsi} \div \text{total luas irigasi}) \times 100\%$	Dinas PUPR (Data Irigasi)
3	Meningkatnya akses terhadap air minum (SPAM)	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum (SPAM)	Definisi: Rumah tangga yang menikmati layanan SPAM standar layak. Formula: $(\text{Jumlah rumah tangga dengan akses SPAM} \div \text{total rumah tangga}) \times 100\%$	Dinas PUPR (Data SPAM)

No	Kinerja	Indikator	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Sumber Data
4	Meningkatnya penyediaan sarana pengelolaan sampah yang sesuai ketentuan	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	Definisi: Desa yang memiliki minimal satu fasilitas TPS/TPST/TPS3R aktif. Formula: $(\text{Jumlah desa dengan TPS/TPST/TPS3R} \div \text{total desa}) \times 100\%$	Dinas PUPR (Data Pembangunan sarana pengelolaan sampah)
5	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Definisi: Rumah tangga yang terhubung ke sistem pengolahan limbah domestik (IPLT/SPALD). Formula: $(\text{Jumlah rumah tangga terlayani pengolahan limbah} \div \text{total rumah tangga}) \times 100\%$	Dinas PUPR (Data Air Limbah)
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan banjir di perkotaan dan lingkungan	Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase dengan kondisi baik	Definisi: Lingkungan perkotaan dengan sistem drainase berfungsi optimal. Formula: $(\text{Jumlah lingkungan dengan drainase baik} \div \text{total lingkungan perkotaan}) \times 100\%$	Dinas PUPR (Survey Drainase)
7	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio Bangunan Gedung kondisi baik dan laik fungsi	Definisi: Bangunan gedung pemerintah dengan status laik fungsi aktif. Formula: $(\text{Jumlah bangunan laik fungsi} \div \text{total bangunan pemerintah}) \times 100\%$	Dinas PUPR (Data Teknis Bangunan Gedung)
8	Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Definisi: Jalan kabupaten dengan kondisi mantap (baik & sedang). Formula: $(\text{Panjang jalan kondisi mantap} \div \text{total panjang jalan kabupaten}) \times 100\%$	Dinas PUPR (Survey Kondisi Jalan)
9	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator /teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Definisi: Tenaga kerja jasa konstruksi bersertifikat kompetensi. Formula: $(\text{Jumlah tenaga kerja bersertifikat} \div \text{total tenaga kerja terdaftar}) \times 100\%$	LPJK, Dinas PUPR (Bidang Jasa Konstruksi)
10	Meningkatnya kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang	Persentase pembangunan daerah yang selaras dengan RTRW	Definisi: Kegiatan pembangunan yang sesuai RTRW. Formula: $(\text{Jumlah kegiatan pembangunan sesuai RTRW} \div \text{total kegiatan pembangunan}) \times 100\%$	Dinas PUPR (Pengendalian Tata Ruang)
		Persentase wilayah kecamatan yang telah dilengkapi dengan RDTR	Definisi: Kecamatan yang memiliki dokumen RDTR dibandingkan total kecamatan. Formula: $(\text{Jumlah kecamatan dengan RDTR} \div \text{total kecamatan}) \times 100\%$	Dinas PUPR (Pengendalian Tata Ruang)
11	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah oleh Inspektorat.	Laporan Sekretariat

II.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 merupakan dokumen kesepakatan kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, serta dukungan anggaran yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Perjanjian kinerja ini menjadi dasar utama dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja perangkat daerah.

Pada Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun dalam dua kerangka perencanaan, yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada periode perencanaan 2021–2025 (APBD 2025), serta Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang telah disesuaikan dengan periode perencanaan 2025–2029 (P-APBD 2025) seiring dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah yang baru. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan arah kebijakan dan keselarasan antara perencanaan jangka menengah dengan pelaksanaan kinerja tahunan.

Perjanjian kinerja memuat indikator-indikator kinerja utama dan strategis yang mencerminkan prioritas pembangunan infrastruktur dan penataan ruang, antara lain peningkatan kondisi infrastruktur, kemantapan jalan, pengelolaan sumber daya air, akses air minum dan sanitasi, sistem drainase, penataan bangunan gedung, jasa konstruksi, kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang, serta penguatan tata kelola perangkat daerah. Seluruh indikator tersebut disertai dengan target kinerja dan alokasi anggaran sebagai bentuk komitmen kinerja yang harus dicapai. Berikut kami sajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 :

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Periode Perencanaan 2021-2025)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	81%
2	Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	95,50%
4	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	10%
5	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%
6	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase	21%
7	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio kepatuhan PBG dan SLF	48%
8	Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	84%
9	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator /teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	52%
10	Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	100%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	01.01	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,50 (A)
		01.02	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	88,50%
		01.03	Indeks Profesionalitas ASN	83,5 (Tinggi)

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2024, bahwa perjanjian kinerja dalam setahun akan mengalami perubahan, jika:

- Terjadi perubahan dan mutasi pejabat;
- Perubahan dalam perencanaan strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel Perjanjian Kinerja dan Anggaran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bab ini dan menjadi dasar pengukuran realisasi kinerja serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Melalui perjanjian kinerja ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Mojokerto.

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Periode Perencanaan 2025-2029)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100,00%
2	Meningkatnya akses terhadap air minum (SPAM)	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum (SPAM)	95,50%
3	Meningkatnya penyediaan sarana pengelolaan sampah yang sesuai ketentuan	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	10,00%
4	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100,00%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan banjir di perkotaan dan lingkungan	Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase dengan kondisi baik	21,00%
6	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio Bangunan Gedung kondisi baik dan laik fungsi	11,00%
7	Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	84,00%
8	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator /teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	52,00%
9	Meningkatnya kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang	Persentase pembangunan daerah yang selaras dengan RTRW	100,00%
		Persentase wilayah kecamatan yang telah dilengkapi dengan RDTR	5,56%
10	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,5

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi anggaran, sebagai berikut:

Tabel II.7 Anggaran Per Program

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26.287.246.960
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	18.480.870.350
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.122.142.593
4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.198.515.000
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.320.652.525
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	24.646.922.000
7	Program Penataan Bangunan Gedung	20.680.772.600
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	240.804.000
9	Program Penyelenggaraan Jalan	140.986.632.094

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.210.434.100
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.627.549.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pada Tahun 2025, pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan dua dokumen perjanjian kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan periode perencanaan 2021–2025, serta Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun setelah ditetapkannya periode perencanaan baru Tahun 2025–2029. Penyesuaian tersebut dilakukan seiring dengan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang baru, sehingga pengukuran kinerja pada Tahun 2025 mencerminkan transisi perencanaan jangka menengah.

Realisasi kinerja diukur secara berkala dan disajikan minimal dalam periode triwulanan untuk menggambarkan perkembangan capaian kinerja sepanjang tahun berjalan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai pada masing-masing indikator kinerja. Data realisasi kinerja diperoleh dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh data teknis serta laporan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing unit kerja.

Apabila terdapat indikator kinerja yang realisasinya belum dapat diukur atau belum tersedia pada periode pelaporan tertentu, maka disertakan penjelasan mengenai faktor penyebab tidak dapat dilakukannya pengukuran, antara lain karena karakteristik indikator yang bersifat tahunan, keterbatasan ketersediaan data, atau masih berlangsungnya proses pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, pengukuran kinerja Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan akuntabel mengenai capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.

Pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 sbb :

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 9 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 4 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 3 indikator;

Tabel III.1.a Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISA SI	CAPAIA N
1	Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	81%	81,81%	101,00%
2	Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%	100%	100,00%
3	Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	95,50%	96,32%	100,86%
4	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	10%	10,90%	109,00%
5	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	99,91%	99,91%
6	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase	21%	21,05%	100,24%
7	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio kepatuhan PBG dan SLF	48%	48%	100,00%
8	Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	84%	85%	101,06%

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISA SI	CAPAIA N
9	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator /teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	52%	61%	116,73%
10	Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	100%	100%	100,00%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	01.01	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,50 (A)	83,54 (A)	101,26%
		01.02	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	88,50%	87,77%	99,18%
		01.03	Indeks Profesionalitas ASN	83,5 (Tinggi)	84,15 (Tinggi)	100,78%
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 Inovasi	2 Inovasi	100,00%

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 6 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 4 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;

Tabel III.1.b Capaian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100,00%	100,00%	100,00%
2	Meningkatnya akses terhadap air minum (SPAM)	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum (SPAM)	95,50%	96,32%	100,86%
3	Meningkatnya penyediaan sarana pengelolaan sampah yang sesuai ketentuan	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	10,00%	10,90%	109,00%
4	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100,00%	99,91%	99,91%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan banjir di perkotaan dan lingkungan	Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase dengan kondisi baik	21,00%	21,05%	100,24%
6	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio Bangunan Gedung kondisi baik dan laik fungsi	11,00%	11,00%	100,00%
7	Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	84,00%	84,89%	101,06%
8	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator /teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	52,00%	60,70%	116,73%
9	Meningkatnya kesesuaian pembangunan infrastruktur	Persentase pembangunan daerah yang selaras dengan RTRW	100,00%	100,00%	100,00%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	dengan rencana tata ruang				
		Persentase wilayah kecamatan yang telah dilengkapi dengan RDTR	5,56%	5,56%	100,00%
10	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,5	83,54	101,26%

III.2 Analisis Kinerja

Analisis kinerja disusun untuk memberikan penjelasan secara rinci terhadap setiap indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Analisis ini mencakup gambaran indikator berupa definisi operasional, formulasi pengukuran, serta konteks capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan adanya penyesuaian periode perencanaan, analisis kinerja per indikator pada Tahun 2025 disajikan berdasarkan dua dokumen perjanjian kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai periode perencanaan 2021–2025 serta Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun setelah ditetapkannya periode perencanaan baru Tahun 2025–2029. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang utuh atas kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan jangka menengah.

III.2.1. Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025

a. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Periode Perencanaan 2021–2025)

1. Persentase Infrastruktur Kondisi Baik

Indikator Persentase Infrastruktur Kondisi Baik merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kelayakan dan kualitas infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, meliputi jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air minum, dan bangunan gedung. *Definisi operasional indikator ini adalah persentase infrastruktur yang berada dalam kondisi baik terhadap total infrastruktur yang dikelola oleh pemerintah daerah.*

Formulasi pengukuran indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah infrastruktur dalam kondisi baik dengan total infrastruktur yang ada, kemudian dikalikan 100 persen. Indikator ini bersifat komposit karena mencerminkan hasil akumulasi dari berbagai sub sektor infrastruktur yang berada di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Perhitungan	
Komponen	2025
<i>Jalan</i>	71,06
<i>Jembatan</i>	61,85
<i>Irigasi</i>	65,70
<i>Air Minum</i>	96,32
<i>Air Limbah Domestik</i>	99,91
<i>Gedung Pemda</i>	96,00
% Infrastruktur Kondisi Baik	81,81

Pada Tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 81% dan terealisasi sebesar 81,81%, sehingga capaian kinerja mencapai 101,00%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum kondisi infrastruktur di Kabupaten Mojokerto telah berada pada kategori baik dan mendekati target yang ditetapkan dalam perencanaan.

2. Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pelayanan jaringan irigasi terhadap seluruh daerah irigasi kewenangan kabupaten. *Definisi operasional indikator ini adalah perbandingan antara luas daerah irigasi yang telah terlayani jaringan irigasi dengan total luas daerah irigasi kewenangan kabupaten.*

Formulasi indikator dihitung dengan membagi luas daerah irigasi yang terlayani jaringan irigasi dengan total luas daerah irigasi kewenangan kabupaten, kemudian dikalikan 100 persen. Indikator ini menggambarkan ketersediaan dan fungsi jaringan irigasi dalam mendukung sektor pertanian.

Pada Tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh daerah irigasi kewenangan kabupaten telah terlayani jaringan irigasi.

Dari 365 Daerah irigasi Kewenangan Kabupaten dengan total luas baku sawah sebesar 17.757 Ha, keseluruhan telah terlayani jaringan irigasi.

3. Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum melalui SPAM

Indikator ini menggambarkan tingkat akses rumah tangga terhadap layanan air minum yang layak melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), baik jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan terlindungi. *Definisi operasional indikator ini adalah persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh akses air minum layak terhadap total rumah tangga di Kabupaten Mojokerto.*

Formulasi pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah rumah tangga yang memperoleh akses air minum melalui SPAM dengan total jumlah rumah tangga, kemudian dikalikan 100 persen.

Pada Tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 95,50% dan terealisasi sebesar 96,32%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,86%. Capaian ini menunjukkan bahwa akses air minum layak telah melampaui target yang direncanakan. *Dari 351.860 Rumah Tangga di Wilayah Kabupaten Mojokerto sebanyak 338.928 Rumah Tangga sudah memperoleh akses air minum layak.*

4. Persentase Desa yang Tersedia TPS/TPST/TPS3R

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan sarana pengelolaan sampah di tingkat desa. *Definisi operasional indikator ini adalah persentase desa di wilayah Kabupaten Mojokerto yang telah memiliki fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), atau TPS3R.*

Formulasi indikator dihitung dengan membandingkan jumlah desa yang memiliki TPS/TPST/TPS3R dengan total jumlah desa, kemudian dikalikan 100 persen.

Pada Tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 10% dan terealisasi sebesar 10,90%, sehingga capaian kinerja mencapai 109,00%. **Dari 304 Desa dan Kelurahan di kabupaten mojokerto, 33 Desa telah memiliki TPS3R.**

5. Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Indikator ini menggambarkan tingkat pelayanan pengolahan air limbah domestik kepada masyarakat. *Definisi operasional indikator ini adalah persentase rumah tangga yang telah memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik terhadap total rumah tangga.*

Formulasi pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah dengan total jumlah rumah tangga, kemudian dikalikan 100 persen.

Target indikator ini pada Tahun 2025 sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 99,91%, sehingga capaian kinerja mencapai 99,91%.

Dari 351.860 Rumah Tangga di Wilayah Kabupaten Mojokerto sebanyak 351.543 Rumah Tangga sudah memperoleh akses air limbah layak.

6. Persentase Perkotaan dan Lingkungan yang Dilengkapi Sistem Drainase

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan dan fungsi sistem drainase dalam mendukung pengendalian genangan dan banjir di kawasan perkotaan dan lingkungan permukiman. *Definisi operasional indikator ini adalah persentase wilayah perkotaan dan lingkungan yang telah dilengkapi sistem drainase terhadap total wilayah perkotaan dan lingkungan.*

Formulasi indikator dihitung dengan membandingkan jumlah wilayah perkotaan dan lingkungan yang telah memiliki sistem drainase dengan total wilayah perkotaan dan lingkungan, kemudian dikalikan 100 persen.

Pada Tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 21% dan terealisasi sebesar 21,05%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,24%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyediaan sistem drainase telah memenuhi bahkan sedikit melampaui target yang direncanakan.

Berdasarkan hasil inventarisasi prasarana drainase di Kabupaten Mojokerto, kebutuhan saluran drainase ideal wilayah yang mencakup kawasan perkotaan dan lingkungan permukiman diperkirakan mencapai 3.030,82 km. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan perencanaan makro yang digunakan sebagai acuan pemenuhan layanan drainase secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dari total kebutuhan tersebut, panjang saluran drainase yang telah terbangun dan berada dalam kondisi baik tercatat sepanjang 607,68 km. Dengan demikian, persentase kawasan perkotaan dan lingkungan yang telah dilengkapi sistem drainase dalam kondisi baik mencapai sebesar 20,05 %.

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah masih memerlukan penanganan lanjutan melalui rehabilitasi saluran eksisting maupun pembangunan

saluran drainase baru, yang akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan fiskal daerah dan prioritas wilayah rawan genangan.

Tabel Perhitungan Capaian Drainase Kabupaten Mojokerto (km)

Uraian	Panjang (km)
Drainase eksisting	1.035,05
• Perdesaan (29 wilayah)	176,68
• Perkotaan (214 wilayah)	858,38
Kebutuhan ideal wilayah	3.030,82
• Perdesaan (44 wilayah)	517,34
• Perkotaan (260 wilayah)	2.513,48
Tambahan kebutuhan baru	1.995,77
Drainase kondisi baik	607,68
Capaian kondisi baik terhadap ideal	20,05%
Panjang belum ideal (rehabilitasi + pembangunan)	2.423,14

7. Rasio Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Indikator Rasio Kepatuhan PBG dan SLF digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan penyelenggaraan bangunan gedung terhadap ketentuan teknis dan administrasi yang berlaku. *Definisi operasional indikator ini adalah perbandingan antara jumlah bangunan gedung yang memenuhi ketentuan PBG dan SLF dengan total bangunan gedung yang menjadi objek pengawasan.*

Formulasi indikator dihitung dengan membagi jumlah bangunan gedung yang patuh terhadap ketentuan PBG dan SLF dengan total bangunan gedung yang dinilai, kemudian dikalikan 100 persen.

Target indikator ini pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 48% dan realisasi mencapai 48%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan bangunan gedung telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perencanaan.

8. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten

Indikator Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten digunakan untuk menggambarkan kondisi jaringan jalan kabupaten yang berada dalam kategori mantap. *Definisi operasional indikator ini adalah persentase panjang jalan kabupaten dengan kondisi mantap terhadap total panjang jalan kabupaten.*

Formulasi indikator dihitung dengan membandingkan panjang jalan dalam kondisi mantap dengan total panjang jalan kabupaten, kemudian dikalikan 100 persen.

Pada Tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 84% dan terealisasi sebesar 84,89%, sehingga capaian kinerja mencapai 101,06%. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi kemantapan jalan kabupaten telah melampaui target yang direncanakan.

JENIS JALAN PANJANG			Persentase	
BETON	485,286	KM	41,61	%
ASPAL	621,780	KM	53,31	%
TELFORD	59,123	KM	5,07	%
TANAH	0,200	KM	0,02	%
	1.166,389	KM	100,00	%
KONDISI				
BAIK	828,797	KM	71,06	%
SEDANG	161,310	KM	13,83	%
RUSAK RINGAN	105,290	KM	9,03	%
RUSAK BERAT	70,992	KM	6,09	%
TOTAL	1.166,389	KM	100,00	%

Kondisi jalan kabupaten pada Tahun 2025 menggambarkan tingkat pelayanan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan hasil survei kondisi jalan, total panjang jalan kabupaten tercatat sebesar 1.166,389 km yang diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori kondisi, yaitu baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat.

Dari total panjang jalan tersebut, jalan dengan kondisi baik mencapai 828,797 km atau 71,06 persen, sedangkan jalan dengan kondisi sedang sepanjang 161,310 km atau 13,83 persen. Adapun jalan dengan kondisi rusak ringan tercatat sepanjang 105,290 km atau 9,03 persen, dan jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 70,992 km atau 6,09 persen.

Berdasarkan pengelompokan tingkat kemantapan jalan, jalan dengan kondisi mantap, yaitu gabungan kondisi baik dan sedang, mencapai panjang 990,107 km atau 84,89 persen dari total panjang jalan kabupaten. Sementara itu, jalan dengan kondisi tidak mantap, yang terdiri dari kondisi rusak ringan dan rusak berat, masih terdapat sepanjang 176,282 km atau 15,11 persen.

9. Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Bersertifikat Kompetensi

Indikator ini digunakan untuk mengukur kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi melalui ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi.

Definisi operasional indikator ini adalah perbandingan antara jumlah tenaga operator, teknisi, dan analis yang memiliki sertifikat kompetensi dengan total tenaga kerja konstruksi yang terdata.

Formulasi indikator dihitung dengan membagi jumlah tenaga bersertifikat dengan total tenaga kerja konstruksi, kemudian dikalikan 100 persen.

Target indikator pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 52% dan terealisasi sebesar 60,70%, sehingga capaian kinerja mencapai 116,73%. Capaian ini menunjukkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia jasa konstruksi yang signifikan.

Pada Tahun 2025, jumlah tenaga kerja konstruksi yang telah memiliki sertifikat kompetensi tercatat sebanyak 258 orang, dari total 425 tenaga kerja konstruksi yang terdaftar. Dengan demikian, capaian indikator ini sebesar 60,7 persen, yang diperoleh dari hasil perhitungan $(258 \div 425) \times 100\%$.

No	Uraian	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Terdaftar	425	Data TKK Kabupaten Mojokerto Tahun 2025
2	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat Kompetensi	258	Sertifikat kompetensi sesuai standar LPJK
3	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Belum Bersertifikat	167	Belum mengikuti/menyelesaikan proses sertifikasi
	Rasio TKK Bersertifikat Kompetensi (%)	60,70%	$(258 \div 425) \times 100$

10. Persentase Kesesuaian Pembangunan Infrastruktur dengan Rencana Tata Ruang

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. *Definisi operasional indikator ini adalah persentase pembangunan infrastruktur yang telah sesuai dengan RTRW terhadap seluruh pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan.*

Formulasi indikator dihitung dengan membandingkan jumlah pembangunan yang selaras dengan RTRW dengan total pembangunan infrastruktur, kemudian dikalikan 100 persen.

Pada Tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

Pada Tahun 2025, pengukuran indikator ini dilaksanakan melalui mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang yang terintegrasi dengan proses perizinan dan fasilitasi perencanaan tata ruang. Kesesuaian pembangunan infrastruktur terhadap RTRW diverifikasi melalui penerbitan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Keterangan Rencana Kota (KRK), yang menjadi dasar penilaian bahwa suatu kegiatan pembangunan telah sesuai dengan peruntukan ruang yang ditetapkan.

Berdasarkan data Bidang Penataan Ruang, sepanjang tahun pelaporan telah diterbitkan sebanyak 337 dokumen PKKPR dan 215 dokumen KRK. Seluruh dokumen tersebut diterbitkan setelah melalui proses verifikasi teknis kesesuaian lokasi dan rencana kegiatan pembangunan terhadap RTRW Kabupaten Mojokerto.

Dengan diterbitkannya dokumen PKKPR dan KRK tersebut, seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur yang diajukan pada Tahun 2025 dinyatakan telah memenuhi ketentuan tata ruang, sehingga secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian indikator Persentase Kesesuaian Pembangunan Infrastruktur dengan Rencana Tata Ruang.

Capaian indikator yang memenuhi target pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang telah berjalan efektif, khususnya dalam memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan infrastruktur telah melalui proses penilaian kesesuaian tata ruang sebelum dilaksanakan. Kondisi ini mencerminkan konsistensi antara formulasi indikator, metode pengukuran, dan hasil capaian kinerja, serta menegaskan peran strategis fungsi penataan ruang dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang terarah, tertib, dan berkelanjutan.

11. Kinerja Lainnya – Tata Kelola dan Inovasi

Selain indikator strategis, Perjanjian Kinerja periode 2021–2025 juga memuat indikator kinerja lainnya yang mendukung tata kelola pemerintahan dan inovasi perangkat daerah, antara lain Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Realisasi Anggaran, Indeks Profesionalitas ASN, serta jumlah inovasi yang terinternalisasi dan berkelanjutan. Indikator-indikator ini diukur sesuai ketentuan masing-masing

instansi pembina dan menjadi cerminan kualitas tata kelola internal perangkat daerah.

b. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Periode Perencanaan 2025–2029)

1. Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberfungsian jaringan irigasi dalam melayani daerah irigasi kewenangan kabupaten. *Definisi operasional indikator ini adalah perbandingan antara luas daerah irigasi yang berfungsi dengan total luas daerah irigasi kewenangan kabupaten.*

Formulasi indikator dihitung dengan membagi luas daerah irigasi yang berfungsi dengan total luas daerah irigasi, kemudian dikalikan 100 persen. Data bersumber dari data teknis irigasi Dinas PUPR.

Target indikator pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100,00%, dengan realisasi sebesar 100,00%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,00%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh daerah irigasi kewenangan kabupaten telah dapat dilayani oleh jaringan irigasi yang berfungsi.

Dari 365 Daerah irigasi Kewenangan Kabupaten dengan total luas baku sawah sebesar 17.757 Ha, keseluruhan telah terlayani jaringan irigasi.

2. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum (SPAM)

Indikator ini mengukur tingkat akses rumah tangga terhadap layanan air minum layak melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). *Definisi operasionalnya adalah persentase rumah tangga yang menikmati layanan SPAM standar layak dibandingkan dengan total rumah tangga di wilayah kabupaten.*

Formulasi indikator dihitung dengan membagi jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPAM dengan total jumlah rumah tangga, kemudian dikalikan 100 persen. Data diperoleh dari Dinas PUPR melalui pengelolaan data SPAM.

Target indikator Tahun 2025 ditetapkan sebesar 95,50%, dengan realisasi sebesar 96,32%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,86%. Capaian ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap air minum layak telah melampaui target yang direncanakan.

Dari 351.860 Rumah Tangga di Wilayah Kabupaten Mojokerto sebanyak 338.928 Rumah Tangga sudah memperoleh akses air minum layak.

3. Persentase Desa di Wilayah Kabupaten yang Tersedia TPS/TPST/TPS3R

Indikator ini digunakan untuk mengukur ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di tingkat desa. *Definisi operasional indikator ini adalah persentase desa yang memiliki minimal satu fasilitas TPS, TPST, atau TPS3R yang aktif dan berfungsi.*

Formulasi indikator dihitung dengan membagi jumlah desa yang memiliki TPS/TPST/TPS3R dengan total jumlah desa di wilayah kabupaten, kemudian dikalikan 100 persen. Data bersumber dari Dinas PUPR melalui data pembangunan sarana pengelolaan sampah.

Pada Tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 10,00%, dengan realisasi sebesar 10,90%, sehingga capaian kinerja mencapai 109,00%. Hal ini menunjukkan adanya percepatan penyediaan sarana pengelolaan sampah di tingkat desa.

Dari 304 Desa dan Kelurahan di kabupaten Mojokerto, 33 Desa telah memiliki TPS3R.

4. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Indikator ini mengukur cakupan pelayanan pengolahan air limbah domestik melalui sistem terpusat maupun setempat. *Definisi operasional indikator ini adalah persentase rumah tangga yang terhubung dengan sistem pengolahan air limbah domestik.*

Formulasi indikator dihitung dengan membagi jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah dengan total jumlah rumah tangga, kemudian dikalikan 100 persen. Data diperoleh dari Dinas PUPR bidang air limbah.

Target indikator Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100,00%, dengan realisasi sebesar 99,91%, sehingga capaian kinerja mencapai 99,91%. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan pengolahan air limbah domestik hampir sepenuhnya menjangkau seluruh rumah tangga.

Dari 351.860 Rumah Tangga di Wilayah Kabupaten Mojokerto sebanyak 351.543 Rumah Tangga sudah memperoleh akses air limbah layak.

5. Persentase Perkotaan dan Lingkungan yang Dilengkapi Sistem Drainase dengan Kondisi Baik

Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas pengelolaan banjir di kawasan perkotaan dan lingkungan. *Definisi operasional indikator ini adalah persentase lingkungan perkotaan yang memiliki sistem drainase dengan kondisi baik dan berfungsi optimal.*

Formulasi indikator dihitung dengan membagi jumlah lingkungan perkotaan yang dilengkapi sistem drainase kondisi baik dengan total lingkungan perkotaan, kemudian dikalikan 100 persen. Data diperoleh melalui survei drainase Dinas PUPR.

Target indikator Tahun 2025 ditetapkan sebesar 21,00%, dengan realisasi sebesar 21,05%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,24%. Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas pengelolaan drainase di kawasan perkotaan.

Berdasarkan hasil inventarisasi prasarana drainase di Kabupaten Mojokerto, kebutuhan saluran drainase ideal wilayah yang mencakup kawasan perkotaan dan lingkungan permukiman diperkirakan mencapai 3.030,82 km. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan perencanaan makro yang digunakan sebagai acuan pemenuhan layanan drainase secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dari total kebutuhan tersebut, panjang saluran drainase yang telah terbangun dan berada dalam kondisi baik tercatat sepanjang 607,68 km. Dengan demikian, persentase kawasan perkotaan dan lingkungan yang telah dilengkapi sistem drainase dalam kondisi baik mencapai sebesar 20,05 %.

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah masih memerlukan penanganan lanjutan melalui rehabilitasi saluran eksisting maupun pembangunan saluran drainase baru, yang akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan fiskal daerah dan prioritas wilayah rawan genangan.

Tabel Perhitungan Capaian Drainase Kabupaten Mojokerto (km)

Uraian	Panjang (km)
Drainase eksisting	1.035,05
• Perdesaan (29 wilayah)	176,68
• Perkotaan (214 wilayah)	858,38
Kebutuhan ideal wilayah	3.030,82
• Perdesaan (44 wilayah)	517,34
• Perkotaan (260 wilayah)	2.513,48

Tambahan kebutuhan baru	1.995,77
Drainase kondisi baik	607,68
Capaian kondisi baik terhadap ideal	20,05%
Panjang belum ideal (rehabilitasi + pembangunan)	2.423,14

7. Rasio Bangunan Gedung Kondisi Baik dan Laik Fungsi

Indikator ini mengukur kualitas penataan bangunan gedung pemerintah. *Definisi operasional indikator ini adalah persentase bangunan gedung pemerintah yang berada dalam kondisi baik dan memiliki status laik fungsi.*

Formulasi indikator dihitung dengan membagi jumlah bangunan gedung laik fungsi dengan total bangunan gedung pemerintah, kemudian dikalikan 100 persen. Data bersumber dari data teknis bangunan gedung Dinas PUPR.

Pada Tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 11,00%, dengan realisasi sebesar 11,00%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,00%.

Berdasarkan hasil pendataan, verifikasi administratif, serta pemutakhiran data bangunan gedung yang dilaksanakan secara bertahap oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto sesuai kewenangan daerah, jumlah bangunan gedung yang menjadi objek pengukuran indikator kinerja rasio bangunan gedung kondisi baik dan laik fungsi tercatat sebanyak 15.361 unit. Penghitungan indikator ini dibatasi pada bangunan gedung yang telah melalui proses identifikasi kondisi fisik dan kelengkapan dokumen administrasi bangunan, khususnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Dalam Perjanjian Kinerja tahun berjalan telah ditetapkan target rasio bangunan gedung kondisi baik dan laik fungsi sebesar 11%. Target tersebut diturunkan ke dalam kebutuhan jumlah bangunan gedung yang secara administratif telah dinyatakan laik fungsi melalui kepemilikan PBG dan SLF, serta secara teknis berada dalam kondisi baik berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan/atau dokumen pendukung yang tersedia.

Hasil perhitungan target dan realisasi capaian indikator dimaksud disajikan pada tabel berikut.

Tabel Perhitungan Target dan Capaian Rasio Bangunan Gedung Kondisi Baik dan Laik Fungsi

Uraian	Jumlah
Total bangunan gedung Kabupaten Mojokerto (objek pengukuran)	15.361 unit
Target rasio bangunan gedung kondisi baik dan laik fungsi	11%
Jumlah bangunan yang dipersyaratkan laik fungsi (target)	1.690 unit
Jumlah bangunan kondisi baik dan telah memiliki PBG dan SLF (hasil verifikasi)	1.690 unit
Rasio capaian	11,00%
Status capaian	Tercapai

Berdasarkan data tersebut, diperoleh rasio bangunan gedung kondisi baik dan laik fungsi sebesar 11,00%, sehingga capaian indikator kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian ini dihitung berdasarkan bangunan gedung yang pada saat pengukuran telah memenuhi kriteria laik fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh dokumen administrasi yang tersedia.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyadari bahwa masih terdapat bangunan gedung yang secara fisik berada dalam kondisi baik tetapi belum seluruhnya memenuhi kelengkapan administrasi PBG dan SLF. Oleh karena itu, capaian kinerja ini akan terus dimutakhirkan seiring dengan proses penertiban administrasi bangunan gedung dan peningkatan kualitas basis data pada periode perencanaan berikutnya.

8. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten

Indikator Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten digunakan untuk menggambarkan kondisi jaringan jalan kabupaten. *Definisi operasional indikator ini adalah persentase panjang jalan kabupaten dengan kondisi mantap (baik dan sedang) terhadap total panjang jalan kabupaten.*

Formulasi indikator dihitung dengan membagi panjang jalan kondisi mantap dengan total panjang jalan kabupaten, kemudian dikalikan 100 persen. Data diperoleh dari survei kondisi jalan Dinas PUPR.

Target indikator Tahun 2025 ditetapkan sebesar 84,00%, dengan realisasi sebesar 84,89%, sehingga capaian kinerja mencapai 101,06%. Capaian ini menunjukkan peningkatan kondisi kemantapan jalan kabupaten.

JENIS JALAN	PANJANG		Persentase	
BETON	485,286	KM	41,61	%
ASPAL	621,780	KM	53,31	%
TELFORD	59,123	KM	5,07	%
TANAH	0,200	KM	0,02	%
	1.166,389	KM	100,00	%
KONDISI				
BAIK	828,797	KM	71,06	%
SEDANG	161,310	KM	13,83	%
RUSAK RINGAN	105,290	KM	9,03	%
RUSAK BERAT	70,992	KM	6,09	%
TOTAL	1.166,389	KM	100,00	%

Kondisi jalan kabupaten pada Tahun 2025 menggambarkan tingkat pelayanan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan hasil survei kondisi jalan, total panjang jalan kabupaten tercatat sebesar 1.166,389 km yang diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori kondisi, yaitu baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat.

Dari total panjang jalan tersebut, jalan dengan kondisi baik mencapai 828,797 km atau 71,06 persen, sedangkan jalan dengan kondisi sedang sepanjang 161,310 km atau 13,83 persen. Adapun jalan dengan kondisi rusak ringan tercatat sepanjang 105,290 km atau 9,03 persen, dan jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 70,992 km atau 6,09 persen.

Berdasarkan pengelompokan tingkat kemantapan jalan, jalan dengan kondisi mantap, yaitu gabungan kondisi baik dan sedang, mencapai panjang 990,107 km atau 84,89 persen dari total panjang jalan kabupaten. Sementara itu, jalan dengan kondisi tidak mantap, yang terdiri dari kondisi rusak ringan dan rusak berat, masih terdapat sepanjang 176,282 km atau 15,11 persen.

9. Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi

Indikator ini mengukur kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi melalui ketersediaan tenaga kerja bersertifikat kompetensi. *Definisi operasional indikator ini adalah persentase tenaga kerja jasa konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi.*

Formulasi indikator dihitung dengan membagi jumlah tenaga kerja bersertifikat dengan total tenaga kerja jasa konstruksi yang terdaftar, kemudian dikalikan 100 persen. Data bersumber dari LPJK dan Dinas PUPR.

Target indikator Tahun 2025 ditetapkan sebesar 52,00%, dengan realisasi sebesar 60,70%, sehingga capaian kinerja mencapai 116,73%. Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan profesionalitas tenaga kerja jasa konstruksi.

Pada Tahun 2025, jumlah tenaga kerja konstruksi yang telah memiliki sertifikat kompetensi tercatat sebanyak 258 orang, dari total 425 tenaga kerja konstruksi yang terdaftar. Dengan demikian, capaian indikator ini sebesar 60,7 persen, yang diperoleh dari hasil perhitungan $(258 \div 425) \times 100\%$.

No	Uraian	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Terdaftar	425	Data TTK Kabupaten Mojokerto Tahun 2025
2	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat Kompetensi	258	Sertifikat kompetensi sesuai standar LPJK
3	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Belum Bersertifikat	167	Belum mengikuti/menyelesaikan proses sertifikasi
	Rasio TTK Bersertifikat Kompetensi (%)	60,70%	$(258 \div 425) \times 100$

10. Persentase Pembangunan Daerah yang Selaras dengan RTRW dan Cakupan RDTR

Indikator ini digunakan untuk mengukur kesesuaian pembangunan daerah dengan rencana tata ruang. *Definisi operasional indikator kesesuaian RTRW adalah persentase kegiatan pembangunan yang selaras dengan RTRW, sedangkan indikator RDTR mengukur cakupan kecamatan yang telah memiliki dokumen RDTR.*

Target kesesuaian RTRW pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100,00% dengan realisasi 100,00%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,00%.

Pada Tahun 2025, pengukuran indikator ini dilaksanakan melalui mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang yang terintegrasi dengan proses perizinan dan

fasilitasi perencanaan tata ruang. Kesesuaian pembangunan infrastruktur terhadap RTRW diverifikasi melalui penerbitan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Keterangan Rencana Kota (KRK), yang menjadi dasar penilaian bahwa suatu kegiatan pembangunan telah sesuai dengan peruntukan ruang yang ditetapkan.

Berdasarkan data Bidang Penataan Ruang, sepanjang tahun pelaporan telah diterbitkan sebanyak 337 dokumen PKKPR dan 215 dokumen KRK. Seluruh dokumen tersebut diterbitkan setelah melalui proses verifikasi teknis kesesuaian lokasi dan rencana kegiatan pembangunan terhadap RTRW Kabupaten Mojokerto.

Dengan diterbitkannya dokumen PKKPR dan KRK tersebut, seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur yang diajukan pada Tahun 2025 dinyatakan telah memenuhi ketentuan tata ruang, sehingga secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian indikator Persentase Kesesuaian Pembangunan Infrastruktur dengan Rencana Tata Ruang.

Capaian indikator yang memenuhi target pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang telah berjalan efektif, khususnya dalam memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan infrastruktur telah melalui proses penilaian kesesuaian tata ruang sebelum dilaksanakan. Kondisi ini mencerminkan konsistensi antara formulasi indikator, metode pengukuran, dan hasil capaian kinerja, serta menegaskan peran strategis fungsi penataan ruang dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang terarah, tertib, dan berkelanjutan.

Target cakupan RDTR ditetapkan sebesar 5,56%, dengan realisasi 5,56%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,00%. Capaian tersebut didasarkan pada kondisi faktual bahwa hingga akhir Tahun 2025, RDTR yang telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah masih sebanyak 1 (satu) RDTR, yaitu RDTR Kecamatan Gedeg. Persentase cakupan dihitung dengan membandingkan jumlah kecamatan yang telah memiliki RDTR yang diperdakan terhadap total jumlah kecamatan di Kabupaten Mojokerto.

Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan instrumen penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan peningkatan kepastian hukum pembangunan wilayah. Hingga akhir Tahun 2025, kondisi penyusunan RDTR di Kabupaten Mojokerto menunjukkan variasi tahapan

kemajuan, mulai dari belum tersusun, telah tersusun materi teknis, dalam proses reviu dan penyempurnaan, hingga telah memperoleh persetujuan substansi.

Beberapa RDTR telah disusun materi teknisnya pada tahun-tahun sebelumnya namun belum dapat ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah karena belum memperoleh persetujuan substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta belum sepenuhnya mengacu pada regulasi terbaru. Kondisi tersebut antara lain terjadi pada RDTR Ngoro dan RDTR Pungging yang materi teknisnya disusun pada Tahun 2019. Untuk kedua RDTR tersebut, pada Tahun 2025 telah dilakukan kegiatan revisi dan reviu materi teknis agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru sebelum diajukan kembali untuk persetujuan substansi.

RDTR Pacet dan Trawas juga telah disusun materi teknisnya pada Tahun 2021, namun belum mencakup seluruh desa serta belum memperoleh persetujuan substansi. Khusus RDTR Trawas, pada Tahun 2025 dilakukan reviu dan penyesuaian materi teknis sebagai bagian dari upaya percepatan penetapan RDTR sesuai regulasi terkini.

Selanjutnya, RDTR Mojosari dan Sooko telah disusun materi teknisnya pada Tahun 2022. Pada Tahun 2025, kedua RDTR tersebut telah memasuki tahap penyusunan rancangan peraturan kepala daerah dan direncanakan untuk diajukan persetujuan substansi ke Kementerian ATR/BPN. RDTR Puri, yang materi teknisnya disusun pada Tahun 2023, pada Tahun 2025 dilakukan reviu terkait batas wilayah dengan Kota Mojokerto serta sedang dalam proses penyusunan rancangan peraturan kepala daerah.

RDTR Kutorejo merupakan salah satu RDTR yang menunjukkan kemajuan signifikan. Penyusunannya mendapatkan bantuan teknis (Bantek) dari Kementerian ATR/BPN melalui anggaran BA-BUN Tahun 2023 Kementerian Keuangan. Hingga Tahun 2025, RDTR Kutorejo telah disusun rancangan peraturan kepala daerahnya dan telah memperoleh surat persetujuan substansi.

Adapun RDTR Gedeg merupakan satu-satunya RDTR yang telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Namun demikian, keberadaan RDTR ini memerlukan penyesuaian kebijakan berupa pencabutan Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2015 tentang RDTR Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Kecamatan Gedeg

Tahun 2015–2035. Pencabutan tersebut dapat dilakukan melalui penetapan Perda RTRW yang baru atau dengan penyusunan Perda pencabutan secara khusus.

Sementara itu, RDTR untuk kecamatan lainnya, yaitu Bangsal, Mojoanyar, Jetis, Kemlagi, Dawarblandong, Trowulan, Dlanggu, Gondang, dan Jatirejo, hingga akhir Tahun 2025 belum disusun. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus agenda strategis yang akan ditindaklanjuti secara bertahap pada periode perencanaan selanjutnya.

Kondisi penyusunan RDTR di Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2025 menunjukkan adanya proses transisi dan percepatan, khususnya melalui kegiatan reviu, penyempurnaan materi teknis, serta penyiapan regulasi. Upaya tersebut menjadi dasar penting untuk meningkatkan cakupan RDTR secara bertahap guna mendukung tertib tata ruang, kepastian pemanfaatan ruang, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

11. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat. Nilai SAKIP mencerminkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Pada Tahun 2025, target Nilai SAKIP Perangkat Daerah ditetapkan sebesar 82,50, dengan realisasi sebesar 83,54, sehingga capaian kinerja mencapai 101,26%. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto.

Peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dilaksanakan melalui tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Tindak lanjut tersebut difokuskan pada empat aspek utama, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Pada aspek perencanaan kinerja, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai target waktu. Upaya yang dilakukan meliputi penyusunan dan finalisasi dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah yang mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Selain itu, telah dilakukan reviu dan sinkronisasi akhir antara dokumen

Renstra, Renja, RKA, dan Perjanjian Kinerja guna memastikan keselarasan perencanaan. Untuk meningkatkan pemahaman aparatur, dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis perencanaan kinerja serta cascading kinerja individu bagi pejabat struktural dan pelaksana. Seluruh rencana aksi pada aspek ini berstatus selesai pada bulan Desember 2025.

Pada aspek pengukuran kinerja, tindak lanjut difokuskan pada peningkatan pemahaman evaluasi dan penilaian kinerja aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pelatihan dan pendampingan pengisian aplikasi e-Kinerja/SUHITA serta pembinaan teknis penyusunan indikator kinerja individu berbasis outcome. Pelaksanaan rencana aksi ini telah diselesaikan sesuai jadwal pada Desember 2025 dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pengukuran kinerja perangkat daerah.

Pada aspek pelaporan kinerja, upaya peningkatan ketepatan waktu dan kualitas laporan kinerja dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang ditargetkan paling lambat bulan Februari tahun berikutnya serta publikasi melalui laman resmi dinas. Hingga akhir Tahun 2025, rencana aksi ini masih dalam status proses dan dijadwalkan selesai pada Februari 2026. Sementara itu, kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala telah dilaksanakan secara triwulanan melalui rapat evaluasi bidang dan pelaporan kepada Kepala Dinas. Selain itu, hasil evaluasi cascading kinerja individu telah disusun dan diintegrasikan ke dalam aplikasi SUHITA. Kedua rencana aksi tersebut telah berstatus selesai pada Desember 2025.

Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, seluruh rencana aksi tindak lanjut telah dilaksanakan dan diselesaikan sesuai target. Kegiatan yang dilakukan meliputi evaluasi terhadap faktor pendorong dan penghambat pencapaian indikator kinerja, penyempurnaan analisis sasaran strategis dalam LKjIP 2025, serta penerapan mekanisme perbaikan internal berbasis hasil evaluasi, seperti penyesuaian indikator dan penguatan koordinasi antarbidang. Selain itu, hasil evaluasi internal juga dimanfaatkan untuk menyusun laporan efisiensi anggaran dan sumber daya sebagai dasar perencanaan peningkatan kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan.

III.2.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

a. Level Sasaran

Analisis perbandingan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi indikator sasaran sampai dengan Tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD/Renstra 2021–2026. Perhitungan progres capaian dilakukan dengan rumus:

$$\text{Progres Capaian} = \frac{\text{Realisasi 2025}}{\text{Target Akhir}} \times 100\%$$

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah mencapai bahkan melampaui target akhir Renstra, meskipun terdapat beberapa indikator yang masih memerlukan akselerasi pada tahun terakhir periode perencanaan.

Tabel III.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir Renstra 2021-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				Targ et Akhir Rens tra	Progr es Capai an
		2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 * 100%
Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	74,99 %	80,00 %	80,57 %	80,93 %	73,88 %	109,5 4%
Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	88,95 %	94,19 %	95,48 %	96,32 %	89,15 %	108,0 4%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				Targ et Akhir Rens tra	Progr es Capai an
		2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 * 100%
	terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten						
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	6,58 %	8,88 %	9,54 %	10,90 %	28,00 %	38,93 %
Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	94,80 %	99,50 %	99,68 %	99,91 %	89,34 %	111,8 3%
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase	11,39 %	18,56 %	20,05 %	21,05 %	21,00 %	100,2 4%
Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio kepatuhan PBG dan SLF	10,00 %	18,81 %	47,77 %	48,00 %	13,00 %	369,2 3%
Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	88,24 %	89,74 %	83,18 %	84,89 %	84,20 %	100,8 2%
Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	18,73 %	30,81 %	51,06 %	60,70 %	36,26 %	167,4 0%
Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
KINERJA LAINNYA							
Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	100,0 0%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				Targ et Akhir Rens tra	Progr es Capai an
		2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 * 100%
	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	84,65 %	84,61 %	88,25 %	87,77 %	87%	100,8 9%
	Indeks profesionalitas ASN	42	88,22	83,05	84,15	80	105,1 9%
Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1	1	2	2	1	200,0 0%

Penjelasan atas Tabel III.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

1. Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung

Realisasi indikator menunjukkan tren peningkatan dari 74,99% (2022) menjadi 80,93% pada Tahun 2025. Jika dibandingkan dengan target akhir sebesar 73,88%, maka progres capaian mencapai 109,54%, yang berarti target akhir Renstra telah terlampaui.

Capaian ini mencerminkan konsistensi intervensi pada sektor jalan, irigasi, sanitasi, air minum, dan bangunan gedung. Keberhasilan ini juga menunjukkan efektivitas pendekatan preservasi dan pemeliharaan rutin dibandingkan pembangunan baru semata.

2. Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Realisasi 2022–2025 konsisten pada angka 100%. Dengan target akhir 100%, maka progres capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan stabilitas pengelolaan jaringan irigasi dan tidak adanya backlog layanan pada kewenangan kabupaten.

3. Meningkatnya Akses terhadap Air Minum (SPAM)

Capaian meningkat dari 88,95% (2022) menjadi 96,32% (2025). Dengan target akhir sebesar 89,15%, progres capaian mencapai 108,04%.

Hal ini menunjukkan bahwa program jaringan SPAM dan optimalisasi sistem eksisting berjalan efektif dan melampaui target jangka menengah.

4. Meningkatnya Penyediaan Sarana Pengelolaan Sampah yang Sesuai Ketentuan

Realisasi meningkat dari 6,58% (2022) menjadi 10,90% (2025). Namun dibandingkan dengan target akhir 28,00%, progres capaian baru mencapai 38,93%. Indikator ini menjadi salah satu yang masih memiliki gap signifikan terhadap target akhir Renstra. Faktor pembatas utama meliputi keterbatasan lahan, kebutuhan pendanaan yang relatif besar, serta penguatan kelembagaan pengelola TPS3R.

5. Meningkatnya Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Realisasi meningkat hingga 99,91% pada Tahun 2025. Dengan target akhir 89,34%, progres capaian mencapai 111,83%, menunjukkan target telah terlampaui. Hal ini dipengaruhi oleh keberhasilan program yang ada.

6. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Banjir di Perkotaan dan Lingkungan

Realisasi meningkat dari 11,39% (2022) menjadi 21,05% (2025). Dengan target akhir 21,00%, progres capaian sebesar 100,24%.

Capaian ini menunjukkan target akhir Renstra telah tercapai, meskipun margin pencapaiannya relatif tipis dan masih memerlukan konsistensi pemeliharaan untuk menjaga keberlanjutan layanan.

7. Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan Gedung

Realisasi melonjak signifikan dari 10,00% (2022) menjadi 48,00% (2025). Dibandingkan target akhir 13,00%, progres capaian mencapai 369,23%.

Lonjakan ini dipengaruhi oleh implementasi digitalisasi PBG serta peningkatan pengawasan bangunan gedung. Namun demikian, kenaikan signifikan ini juga menunjukkan bahwa baseline awal relatif rendah sehingga peningkatan tampak sangat progresif.

8. Meningkatnya Kemantapan Jalan

Realisasi menunjukkan fluktuasi dari 88,24% (2022) menjadi 84,89% (2025). Dengan target akhir 84,20%, progres capaian sebesar 100,82%, yang berarti target akhir telah terpenuhi.

Meskipun demikian, tren penurunan pada 2024 menunjukkan sensitivitas indikator terhadap penambahan ruas jalan, anggaran dan faktor eksternal seperti cuaca dan beban lalu lintas.

9. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Realisasi meningkat signifikan dari 18,73% (2022) menjadi 60,70% (2025). Dengan target akhir 36,26%, progres capaian mencapai 167,40%.

Hal ini menunjukkan keberhasilan fasilitasi sertifikasi tenaga konstruksi dan peningkatan kapasitas SDM teknis daerah.

10. Meningkatnya Kesesuaian Pembangunan Infrastruktur dengan Rencana Tata Ruang

Realisasi konsisten 100% sepanjang periode 2022–2025. Dengan target akhir 100%, progres capaian sebesar 100%.

Indikator ini menunjukkan stabilitas pengendalian pemanfaatan ruang dan konsistensi rekomendasi teknis berbasis RTRW.

11. Kinerja lainnya

- Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Capaian tetap pada kategori **A** selama periode 2022–2025 dengan progres 100%. Hal ini menunjukkan konsistensi tata kelola kinerja.

- Persentase Realisasi Anggaran

Realisasi 2025 sebesar 87,77% dibanding target 87% menghasilkan progres 100,89%, menunjukkan efisiensi dan pengendalian anggaran yang relatif baik.

- Indeks Profesionalitas ASN

Realisasi 84,15 dibanding target 80 menghasilkan progres 105,19%, menunjukkan peningkatan kapasitas aparatur.

- Jumlah Inovasi Berkelanjutan

Realisasi 2 inovasi dibanding target 1 menghasilkan progres 200%, menunjukkan penguatan budaya inovasi di lingkungan perangkat daerah.

Sedangkan untuk realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target sesuai periode perencanaan terbaru renstra 2025-2029, cenderung mengalami peningkatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	2024		Tingkat Capaian	2025		Tingkat Capaian	Perbandingan
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Capaian tetap 100%; kinerja stabil dan konsisten.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	2024		Tingkat Capaian	2025		Tingkat Capaian	Perbandingan
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya akses terhadap air minum (SPAM)	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum (SPAM)	95,50 %	95,48%	99,98 %	95,50 %	96,32%	100,86%	Capaian naik dari 99,98% ke 100,86%; realisasi meningkat.
Meningkatnya penyediaan sarana pengelolaan sampah yang sesuai ketentuan	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	10,00 %	9,54%	95,40 %	10,00 %	10,90%	109,00%	Capaian naik signifikan; target 2025 terlampaui.
Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100,00%	99,68%	99,68 %	100,00%	99,91%	99,91 %	Capaian relatif stabil; mendekati target penuh.
Meningkatnya kualitas pengelolaan banjir di perkotaan dan lingkungan	Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase dengan kondisi baik	20,00 %	20,05%	100,25%	21,00 %	21,05%	100,24%	Capaian stabil; sedikit melampaui target.
Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio Bangunan Gedung kondisi baik dan laik fungsi	20,00 %	47,77%	238,85%	11,00 %	11,00%	100,00%	Capaian stabil sesuai target.
Meningkatnya kemandapan jalan	Tingkat Kemandapan Jalan Kabupaten	93,00 %	83,18%	89,44 %	84,00 %	84,89%	101,06%	Capaian meningkat signifikan; target 2025 terlampaui.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	2024		Tingkat Capaian	2025		Tingkat Capaian	Perbandingan
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator /teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	38,00 %	51,06%	134,37%	52,00 %	60,70%	116,73%	Capaian tetap tinggi; melampaui target.
Meningkatnya kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang	Persentase pembangunan daerah yang selaras dengan RTRW	100,00%	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00%	Capaian tetap 100%; konsisten.
	Persentase wilayah kecamatan yang telah dilengkapi dengan RDTR	5,56%	5,56%	100,00%	5,56%	5,56%	100,00%	Capaian stabil sesuai target.
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82	82,15	100,18%	82,5	83,54	101,26%	Capaian meningkat ; nilai melampaui target.

Berdasarkan hasil perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025, secara umum terdapat kecenderungan peningkatan dan stabilitas kinerja pada sebagian besar indikator sasaran strategis Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto.

Pada sasaran **pengelolaan infrastruktur sumber daya air**, capaian tetap konsisten sebesar 100% pada kedua tahun. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh daerah irigasi kewenangan kabupaten telah terlayani jaringan irigasi sesuai target yang ditetapkan. Stabilitas capaian ini mencerminkan keberlanjutan fungsi layanan irigasi melalui kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi rutin.

Untuk sasaran **akses air minum (SPAM)**, terjadi peningkatan tingkat capaian dari 99,98% pada tahun 2024 menjadi 100,86% pada tahun 2025. Realisasi yang melampaui target menunjukkan adanya optimalisasi pelayanan dan perluasan akses

rumah tangga terhadap air minum, baik melalui jaringan perpipaan maupun non-perpipaan terlindungi.

Pada sasaran **penyediaan sarana pengelolaan sampah**, capaian meningkat signifikan dari 95,40% menjadi 109,00%. Kondisi ini menunjukkan percepatan penyediaan TPS/TPST/TPS3R di tingkat desa sehingga target tahun 2025 berhasil terlampaui.

Untuk **akses layanan pengolahan air limbah domestik**, capaian relatif stabil dan mendekati target penuh, yakni 99,68% pada tahun 2024 dan 99,91% pada tahun 2025. Meskipun belum mencapai 100%, selisih yang sangat kecil menunjukkan bahwa cakupan layanan sudah sangat tinggi.

Pada sasaran **kualitas pengelolaan banjir dan drainase perkotaan**, capaian tahun 2024 dan 2025 sama-sama sedikit melampaui target (di atas 100%). Hal ini menunjukkan konsistensi dalam pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase lingkungan.

Sebaliknya, pada sasaran **kualitas penataan bangunan gedung**, terjadi penurunan capaian yang signifikan. Tahun 2024 menunjukkan capaian sangat tinggi (238,85%), sedangkan pada tahun 2025 terealisasi sebesar (100%). Perbedaan ini mengindikasikan adanya faktor administratif dan penyesuaian metode pengukuran atau proses verifikasi data yang mempengaruhi pencatatan realisasi tahun berjalan.

Untuk **kemantapan jalan kabupaten**, terjadi peningkatan signifikan. Tahun 2024 capaian masih di bawah target (71,68%), sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 101,06% sehingga target terlampaui. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan intervensi penanganan jalan prioritas.

Pada sasaran **kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi**, capaian tetap tinggi dan melampaui target pada kedua tahun, yakni 134,37% pada 2024 dan 116,73% pada 2025. Hal ini menunjukkan keberhasilan program fasilitasi sertifikasi tenaga konstruksi.

Sasaran **kesesuaian pembangunan dengan RTRW** menunjukkan capaian konsisten 100% pada kedua indikator (keselarasan RTRW dan cakupan RDTR). Hal ini menandakan bahwa seluruh pembangunan infrastruktur telah mengacu pada dokumen tata ruang yang berlaku.

Terakhir, pada sasaran **kualitas tata kelola perangkat daerah**, nilai SAKIP mengalami peningkatan dari 82,15 pada tahun 2024 menjadi 83,54 pada tahun 2025, dengan tingkat capaian di atas 100%. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam sistem perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah.

b. Level Program

Realisasi kinerja Tahun 2025 perlu dianalisis secara komprehensif dengan membandingkannya terhadap capaian tahun-tahun sebelumnya guna memperoleh gambaran tren, konsistensi, dan arah perkembangan kinerja pada level program. Perbandingan ini tidak hanya bertujuan untuk menilai tingkat keberlanjutan hasil pembangunan, tetapi juga untuk mengidentifikasi dinamika perubahan kebijakan, kapasitas fiskal, serta efektivitas pelaksanaan program dari waktu ke waktu. Mengingat Tahun 2025 merupakan tahun awal periode perencanaan Renstra 2025–2029 sekaligus masa transisi dari periode sebelumnya, maka evaluasi komparatif ini menjadi penting sebagai dasar penguatan strategi, penajaman intervensi program, serta penetapan langkah perbaikan pada tahun-tahun berikutnya.

Perbandingan realisasi kumulatif kinerja program terhadap target akhir renstra 2021-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Program terhadap renstra 2021-2026

Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Realisasi					Target Akhir Renstra	Progress Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
Meningkatkan kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Panjang Jaringan Irigasi (Primer, Sekunder, Tersier) dalam Kondisi Baik	%	43,18	44,09	56,70	65,12	66,67	81,00	82%
Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	KK	308968	315.647,00	323.852,00	329.426,00	338.927,77	349.872,00	97%

Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Realisasi					Target Akhir Renstra	Progress Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
	terlindungi di dalam sebuah kabupaten								
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Persentase TPS/TPST /TPS3R yang berkualitas	%	4,61	6,58	8,88	9,54	10,86	18,00	60%
Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah rumah dgn akses unit pengolahan setempat dan jumlah rumah dgn akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	Rumah	317.654,00	318.798,00	322.511,00	342.451,00	343.241,00	283.955,00	121%
Meningkatkan ketersediaan Sistem pengelolaan Drainase	Persentase Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	%	10,86	11,39	18,56	20,56	21,05	18,00	117%
Meningkatnya bangunan gedung instansi pemerintah yang laik fungsi	Rasio bangunan gedung instansi pemerintah yang laik fungsi	%	91,5	92,45	93,50	96,00	96,5	100,00	97%
Meningkatnya bangunan gedung sesuai RTBL	Persentase bangunan gedung sesuai RTBL	%	0	0,00	0,00	8,00	9,00	10,00	90%
Meningkatnya jalan dan jembatan	Persentase Jalan Kabupaten	%	75,92	77,24	78,66	66,60	71,06	61,00	116%

Sasaran Program	Indikator Program	Satuan	Realisasi					Target Akhir Renstra	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
kabupaten kondisi baik	Kondisi Baik								
	Persentase Jembatan Kondisi Baik	%	55,68	55,85	59,80	60,77	61,85	56,00	110%
Meningkatnya Badan Usaha yang memiliki tenaga kerja konstruksi bersertifikat terampil	Persentase Badan Usaha yang memiliki tenaga kerja konstruksi bersertifikat terampil	%	0	4,15	6,23	8,75	10,48	8,00	131%
Mempertahankan kesesuaian pembangunan/ peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang	%	100	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100%
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	-	41,71	88,22	83,05	84,15	80,00	105%
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	%	80,71	84,65	84,61	88,25	87,77	90,00	98%
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,36	83,92	81,37	82,15	83,54	84,00	99%
	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	inovasi	1	1	2	2	2	1,00	200%

Berdasarkan tabel realisasi kinerja program periode 2021–2025, secara umum capaian menunjukkan tren peningkatan yang progresif pada sebagian besar indikator, dengan beberapa indikator telah melampaui target akhir Renstra dan sebagian lainnya masih memerlukan percepatan.

1. Sumber Daya Air/Irigasi

Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik meningkat signifikan dari 43,18% pada Tahun 2021 menjadi 66,67% pada Tahun 2025. Capaian ini telah mencapai 82% dari target akhir Renstra sebesar 81%. Peningkatan yang konsisten sejak Tahun 2023 menunjukkan efektivitas strategi rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara bertahap. Meskipun belum mencapai target akhir secara penuh, tren pertumbuhan menunjukkan arah yang positif dan realistis untuk dicapai pada sisa periode perencanaan.

2. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Jumlah kumulatif rumah tangga yang memperoleh akses air minum meningkat dari 308.968 KK pada Tahun 2021 menjadi 338.927,77 KK pada Tahun 2025. Dengan target akhir 349.872 KK, progres capaian telah mencapai 97%. Kenaikan yang relatif stabil tiap tahun menunjukkan keberlanjutan pengembangan SPAM perpipaan maupun non-perpipaan terlindungi. Indikator ini berada pada jalur yang sangat baik menuju pencapaian target akhir.

3. Pengelolaan Sampah

Persentase TPS/TPST/TPS3R berkualitas meningkat dari 4,61% pada Tahun 2021 menjadi 10,86% pada Tahun 2025. Namun demikian, dibandingkan target akhir 18%, progres baru mencapai 60%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan bertahap, akselerasi masih diperlukan, terutama dalam peningkatan kualitas sarana serta penguatan kelembagaan pengelola di tingkat desa/kelurahan.

4. Sistem Air Limbah

Jumlah rumah dengan akses layanan SPALD-S dan SPALD-T meningkat dari 317.654 unit pada Tahun 2021 menjadi 343.241 unit pada Tahun 2025. Capaian ini telah melampaui target akhir Renstra sebesar 283.955 rumah, dengan progres 121%. Hal ini menunjukkan keberhasilan program sanitasi dalam memenuhi pelayanan dasar, sekaligus menjadi salah satu indikator dengan performa terbaik.

5. Sistem Drainase

Persentase drainase yang terhubung langsung dengan sungai meningkat dari 10,86% menjadi 21,05% pada Tahun 2025, melampaui target akhir 18% dengan progres 117%. Capaian ini mencerminkan keberhasilan intervensi peningkatan konektivitas sistem drainase dalam mendukung pengendalian genangan dan banjir.

6. Bangunan Gedung

Rasio bangunan gedung instansi pemerintah yang laik fungsi meningkat konsisten dari 91,5% menjadi 96,5% pada Tahun 2025. Dengan target akhir 100%, progres telah mencapai 97%. Hal ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam pengawasan dan pemenuhan standar laik fungsi bangunan pemerintah.

Sementara itu, persentase bangunan gedung sesuai RTBL menunjukkan peningkatan dari 0% (2021–2023) menjadi 9% pada Tahun 2025. Dengan target akhir 10%, progres mencapai 90%, menandakan percepatan signifikan sejak Tahun 2024 setelah tersedianya dokumen dan implementasi kebijakan penataan bangunan berbasis RTBL.

7. Jalan dan Jembatan

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik mengalami fluktuasi, dari 75,92% pada Tahun 2021, meningkat hingga 78,66% pada Tahun 2023, kemudian turun pada Tahun 2024 menjadi 66,60%, dan kembali meningkat menjadi 71,06% pada Tahun 2025. Dibandingkan target akhir 61%, capaian telah mencapai 116%. Meskipun sempat terjadi penurunan akibat faktor eksternal dan keterbatasan fiskal, secara kumulatif indikator ini telah melampaui target akhir.

Persentase jembatan kondisi baik meningkat dari 55,68% menjadi 61,85% pada Tahun 2025, melampaui target akhir 56% dengan progres 110%. Stabilitas peningkatan menunjukkan konsistensi pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan.

8. Jasa Konstruksi

Persentase badan usaha yang memiliki tenaga kerja konstruksi bersertifikat terampil meningkat dari 0% pada Tahun 2021 menjadi 10,48% pada Tahun 2025. Dengan target akhir 8%, progres mencapai 131%. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi kompetensi tenaga kerja.

9. Kesesuaian Tata Ruang

Persentase kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang konsisten pada angka 100% sepanjang periode 2021–2025, sesuai dengan target akhir Renstra. Capaian ini menunjukkan konsistensi pengendalian pemanfaatan ruang.

10. Kinerja Perangkat Daerah

Indeks Profesionalitas ASN meningkat signifikan sejak 2022 dan pada Tahun 2025 mencapai 84,15, melampaui target akhir 80 dengan progres 105%. Hal ini mencerminkan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur.

Persentase realisasi anggaran meningkat dari 80,71% (2021) menjadi 87,77% (2025). Dengan target akhir 90%, progres telah mencapai 98%, menunjukkan pengelolaan anggaran yang semakin optimal.

Nilai SAKIP perangkat daerah menunjukkan tren peningkatan dari 81,36 (2021) menjadi 83,54 (2025). Dengan target akhir 84,00, progres telah mencapai 99%, mencerminkan penguatan tata kelola berbasis kinerja.

Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan berkelanjutan meningkat dari 1 inovasi menjadi 2 inovasi, melampaui target akhir 1 inovasi (200%). Hal ini menunjukkan komitmen terhadap pengembangan inovasi layanan publik.

Sedangkan untuk periode perencanaan 2025-2029, berikut kami sajikan tabel perbandingannya :

Tabel III.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Program terhadap renstra 2025-2029

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Realisasi		Target Akhir RENSTRA	Progres Capaian
		2024	2025		
Meningkatnya ketersediaan dan kontinuitas suplai air irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi	65%	65,33%	73%	89,49%
Terpenuhinya kebutuhan dasar air minum masyarakat	Persentase rumah tangga memperoleh akses air minum	95,48%	96,32%	100%	96,32%
Lingkungan bersih dan berkelanjutan	Persentase desa yang memiliki sarana pengelolaan sampah sesuai standar	9,54%	10,90%	15%	72,67%
Terjaganya kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan SPAL yang layak	99,68%	99,91%	100%	99,91%
Berkurangnya genangan dan banjir di kawasan permukiman	Persentase kawasan dengan sistem drainase yang berfungsi baik	20,05%	21,05%	26%	80,96%
Terwujudnya bangunan aman dan berfungsi sesuai peruntukannya	Persentase bangunan gedung yang memiliki PBG dan SLF	48%	48%	16%	300,00%
Meningkatnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persentase peningkatan jalan baik terhadap total jalan kabupaten	66,66%	71,06%	89%	79,84%
Meningkatnya profesionalitas SDM jasa konstruksi	Persentase peningkatan SDM jasa konstruksi bersertifikat	30,81%	51,06%	57%	89,58%

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Realisasi		Target Akhir RENSTRA	Progres Capaian
		2024	2025		
Meningkatnya kepatuhan pembangunan terhadap tata ruang	Persentase kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW	100%	100%	100%	100,00%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran PD	88,25%	87,77%	91,50%	95,92%
	Nilai IKM PD	85,4	86	87,7	98,06%

Berdasarkan perbandingan realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra, secara umum kinerja program menunjukkan tren yang positif dengan sebagian besar indikator berada pada jalur yang sesuai, bahkan beberapa telah melampaui target akhir.

1. Ketersediaan dan Kontinuitas Suplai Air Irigasi

Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi meningkat dari 65% pada Tahun 2024 menjadi 65,33% pada Tahun 2025. Dengan target akhir Renstra sebesar 73%, progres capaian telah mencapai 89,49%. Kenaikan ini menunjukkan keberlanjutan program rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, meskipun percepatan masih diperlukan untuk mencapai target optimal pada akhir periode perencanaan.

2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Air Minum

Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum meningkat dari 95,48% menjadi 96,32% pada Tahun 2025. Dengan target akhir 100%, progres telah mencapai 96,32%. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan dasar air minum telah mendekati universal access, dengan tantangan utama berada pada wilayah dengan keterbatasan geografis atau kepadatan rendah.

3. Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Persentase desa yang memiliki sarana pengelolaan sampah sesuai standar meningkat dari 9,54% pada Tahun 2024 menjadi 10,90% pada Tahun 2025. Dibandingkan target akhir 15%, progres capaian mencapai 72,67%. Meskipun menunjukkan peningkatan, indikator ini masih memerlukan percepatan melalui penguatan sarana TPS3R dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola di tingkat desa.

4. Layanan Air Limbah

Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan SPAL layak meningkat dari 99,68% menjadi 99,91%. Dengan target akhir 100%, progres telah mencapai 99,91%. Indikator ini menunjukkan kinerja sangat baik dan hampir mencapai target maksimal, mencerminkan keberhasilan program sanitasi dasar.

5. Sistem Drainase dan Pengendalian Genangan

Persentase kawasan dengan sistem drainase berfungsi baik meningkat dari 20,05% menjadi 21,05%. Dengan target akhir 26%, progres capaian sebesar 80,96%. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi drainase telah memberikan dampak, namun masih diperlukan penguatan integrasi jaringan dan penanganan kawasan rawan genangan.

6. Bangunan Gedung dengan PBG dan SLF

Persentase bangunan gedung yang memiliki PBG dan SLF tercatat 48% pada Tahun 2024 dan tetap 48% pada Tahun 2025. Dengan target akhir Renstra sebesar 16%, progres mencapai 300%. Capaian ini secara kuantitatif telah melampaui target akhir secara signifikan, yang dapat disebabkan oleh penyesuaian baseline awal Renstra atau percepatan implementasi regulasi perizinan bangunan berbasis PBG dan SLF.

7. Jalan Kabupaten Kondisi Baik

Persentase jalan kabupaten kondisi baik meningkat dari 66,66% pada Tahun 2024 menjadi 71,06% pada Tahun 2025. Dibandingkan target akhir 89%, progres capaian sebesar 79,84%. Kenaikan ini menunjukkan adanya pemulihan dan peningkatan kualitas jalan, namun tetap memerlukan dukungan anggaran berkelanjutan untuk mencapai target akhir.

8. Profesionalitas SDM Jasa Konstruksi

Persentase peningkatan SDM jasa konstruksi bersertifikat naik signifikan dari 30,81% menjadi 51,06% pada Tahun 2025. Dengan target akhir 57%, progres telah mencapai 89,58%. Hal ini menunjukkan efektivitas program pembinaan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi.

9. Kepatuhan terhadap Tata Ruang

Persentase kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW konsisten pada angka 100% pada Tahun 2024 dan 2025, sesuai target akhir Renstra. Hal ini mencerminkan konsistensi pengendalian pemanfaatan ruang dan kepatuhan terhadap dokumen tata ruang yang berlaku.

10. Kualitas Pelayanan Umum dan Tata Kelola

Persentase realisasi anggaran perangkat daerah sedikit menurun dari 88,25% menjadi 87,77%. Dengan target akhir 91,50%, progres mencapai 95,92%. Meskipun terdapat penurunan tipis, kinerja penyerapan anggaran tetap dalam kategori baik.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat dari 85,4 menjadi 86 pada Tahun 2025. Dengan target akhir 87,7, progres telah mencapai 98,06%. Hal ini menunjukkan peningkatan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

III.2.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi tahun 2025-2029

Tabel III.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Renstra 2025-2029

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi	100,00%	100,00%	100,00% (Sesuai Target)
2	Meningkatnya akses terhadap air minum (SPAM)	Persentase rumah tangga mendapatkan akses air minum	100,00%	96,32%	96,32% (Mendekati Target)
3	Meningkatnya penyediaan sarana pengelolaan sampah	Persentase desa tersedia TPS/TPST/TPS3R	15,00%	10,90%	72,67% (Perlu Akselerasi)
4	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase rumah tangga memperoleh layanan air limbah	100,00%	99,91%	99,91% (Mendekati Target)
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan banjir	Persentase wilayah dilengkapi sistem drainase kondisi baik	26,00%	21,05%	80,96% (Perlu Peningkatan Bertahap)
6	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio bangunan kondisi baik dan laik fungsi	16,00%	11,00%	68,75% (Perlu Percepatan)
7	Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	89,00%	84,89%	95,38% (Mendekati Target)

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
8	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Rasio tenaga bersertifikat kompetensi	57,00%	60,70%	106,49% (Melampaui Target)
9	Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan RTRW	Persentase pembangunan selaras RTRW	100,00%	100,00%	100,00% (Sesuai Target)
		Persentase kecamatan dilengkapi RDTR	33,33%	5,56%	16,68% (Masih Sangat Rendah)
10	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84	83,54	99,45% (Mendekati Target)

Berdasarkan hasil perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra 2025–2029, secara umum posisi capaian menunjukkan kondisi yang relatif progresif, dengan sebagian indikator telah sesuai atau mendekati target akhir, sementara beberapa indikator lainnya masih memerlukan akselerasi dan intervensi strategis.

Pada sasaran **pengelolaan infrastruktur sumber daya air**, capaian telah mencapai 100% dan sesuai dengan target akhir Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh daerah irigasi kewenangan kabupaten telah terlayani jaringan irigasi secara optimal. Dengan kondisi ini, fokus lima tahun ke depan diarahkan pada menjaga kualitas layanan dan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi.

Untuk sasaran **akses terhadap air minum (SPAM)**, realisasi 2025 sebesar 96,32% atau 96,32% dari target akhir. Capaian ini tergolong mendekati target dan menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga telah memperoleh akses air minum. Upaya percepatan masih diperlukan untuk menjangkau sisa wilayah yang belum terlayani serta memastikan keberlanjutan dan kualitas layanan.

Pada sasaran **penyediaan sarana pengelolaan sampah**, tingkat kemajuan baru mencapai 72,67% dari target akhir. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, cakupan desa yang memiliki TPS/TPST/TPS3R masih memerlukan percepatan pembangunan sarana dan penguatan aspek operasional di tingkat desa.

Sasaran **akses layanan pengolahan air limbah domestik** telah mencapai 99,91% dari target akhir. Capaian ini menunjukkan kondisi yang sangat mendekati target dan

secara substansial telah memenuhi sasaran Renstra. Tantangan ke depan lebih pada menjaga kualitas layanan dan konsistensi data.

Pada sasaran **kualitas pengelolaan banjir dan drainase perkotaan**, tingkat kemajuan mencapai 80,96% dari target akhir. Angka ini menunjukkan progres yang cukup baik, namun masih diperlukan peningkatan bertahap untuk mencapai target 26% pada akhir periode. Intervensi pembangunan dan rehabilitasi drainase perlu terus diprioritaskan.

Sasaran **kualitas penataan bangunan gedung** menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 68,75%. Capaian ini relatif masih rendah dibandingkan target akhir, sehingga memerlukan percepatan pendataan, pengawasan, serta implementasi PBG dan SLF secara lebih optimal pada periode berjalan.

Pada sasaran **kemantapan jalan kabupaten**, capaian telah mencapai 95,38% dari target akhir. Posisi ini tergolong mendekati target dan menunjukkan bahwa tingkat kemantapan jalan berada pada kondisi yang cukup baik. Upaya preservasi dan pemeliharaan rutin menjadi kunci untuk menjaga stabilitas capaian hingga akhir periode.

Untuk sasaran **kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi**, capaian telah melampaui target akhir dengan tingkat kemajuan sebesar 106,49%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga bersertifikat kompetensi telah melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga kebijakan ke depan dapat difokuskan pada peningkatan kualitas dan spesialisasi kompetensi.

Pada sasaran **kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang**, indikator keselarasan RTRW telah mencapai 100% dan sesuai target akhir. Namun demikian, indikator cakupan RDTR baru mencapai 16,68% dari target akhir, yang menunjukkan bahwa penyusunan RDTR masih menjadi pekerjaan rumah strategis dalam periode 2025–2029 dan memerlukan dukungan anggaran serta percepatan proses perencanaan.

Terakhir, pada sasaran **kualitas tata kelola perangkat daerah**, nilai SAKIP telah mencapai 99,45% dari target akhir. Posisi ini sangat mendekati target dan menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja perangkat daerah telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai nilai optimal. Evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dalam periode perencanaan 2021–2026 menunjukkan capaian yang secara umum progresif, khususnya pada indikator layanan dasar infrastruktur. Namun demikian,

terdapat variasi capaian antar indikator yang menjadi dasar perumusan strategi pada periode Renstra 2025–2029.

III.2.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

a. Analisis Keberhasilan dan Peningkatan Kinerja

Selama periode 2021–2026, beberapa indikator menunjukkan stabilitas bahkan peningkatan signifikan. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi berhasil dipertahankan pada angka 100%. Keberhasilan ini terutama disebabkan oleh konsistensi pemeliharaan rutin dan rehabilitasi jaringan irigasi berbasis prioritas tingkat kerusakan. Pendekatan preservasi terbukti lebih efisien dibandingkan pembangunan baru, sehingga penggunaan anggaran dapat lebih terkendali namun tetap menghasilkan capaian optimal.

Akses terhadap air minum (SPAM) dan layanan pengolahan air limbah domestik juga menunjukkan peningkatan hingga mendekati target universal. Faktor keberhasilan utamanya meliputi optimalisasi SPAM eksisting, dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta integrasi data rumah tangga penerima manfaat. Efisiensi dicapai melalui kombinasi pembiayaan pusat dan daerah serta pendekatan bertahap dalam ekspansi layanan.

Pada sektor jasa konstruksi, rasio tenaga operator/teknisi/analisis bersertifikat kompetensi bahkan melampaui target akhir Renstra. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh pola fasilitasi sertifikasi berbasis kolaborasi dengan lembaga kompetensi, yang relatif lebih hemat dibanding penyelenggaraan pelatihan konvensional penuh. Peningkatan regulasi nasional terkait kompetensi tenaga konstruksi juga mendorong percepatan capaian indikator ini.

Dari aspek tata kelola, nilai SAKIP perangkat daerah menunjukkan tren peningkatan, mencerminkan perbaikan sistem perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Penguatan cascading kinerja individu serta integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja menjadi faktor pendukung utama.

Memasuki periode 2025–2029, capaian Tahun 2025 menjadi baseline yang relatif kuat untuk sebagian besar indikator tersebut. Fokus kebijakan bergeser dari sekadar peningkatan kuantitatif menjadi penguatan kualitas layanan, keberlanjutan sistem, dan ketahanan infrastruktur terhadap risiko lingkungan.

b. Analisis Penurunan atau Belum Optimalnya Capaian

Meskipun terdapat keberhasilan, beberapa indikator dalam periode 2021–2026 belum mencapai target optimal atau mengalami fluktuasi.

Pada sektor kemantapan jalan, capaian sempat mengalami penurunan sebelum kembali meningkat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas fiskal daerah, kenaikan harga material konstruksi, serta kerusakan akibat curah hujan ekstrem dan beban kendaraan berat. Program Penyelenggaraan Jalan terdampak oleh dinamika ini. Solusi yang dilakukan meliputi penanganan berbasis prioritas ruas kritis, penguatan pengawasan mutu pekerjaan, dan pendekatan rehabilitasi bertahap.

Pada sektor penataan bangunan gedung, perubahan regulasi dari IMB menjadi PBG serta implementasi SLF menyebabkan penyesuaian sistem pengukuran dan verifikasi administratif. Hal ini berdampak pada fluktuasi capaian indikator rasio bangunan laik fungsi. Efisiensi belum optimal karena sistem pendataan belum sepenuhnya terintegrasi secara digital.

Cakupan RDTR merupakan indikator dengan tingkat kemajuan terendah. Penyebab utama meliputi proses penyusunan teknis yang panjang, kebutuhan persetujuan substansi dari pemerintah pusat, biaya penyusunan yang relatif besar, serta keterbatasan tenaga perencana tata ruang. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan bukan semata pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada kompleksitas regulasi dan tata kelola.

Pada penyediaan TPS/TPST/TPS3R, capaian meningkat namun belum optimal terhadap target akhir. Keterbatasan lahan, kapasitas kelembagaan pengelola di tingkat desa, serta keberlanjutan operasional menjadi faktor penghambat utama.

Memasuki periode 2025–2029, indikator-indikator tersebut menjadi fokus akselerasi dengan strategi yang lebih terarah dan berbasis roadmap tahunan.

c. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum, periode 2021–2026 menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang cukup baik, terutama pada sektor irigasi, SPAM, dan jasa konstruksi. Pendekatan pemeliharaan preventif, prioritisasi kegiatan berbasis tingkat urgensi, serta pemanfaatan dana transfer pusat berkontribusi terhadap efisiensi anggaran.

Namun, pada sektor RDTR dan bangunan gedung, efisiensi relatif belum optimal karena ketergantungan pada proses teknis dan administratif eksternal yang memerlukan waktu dan biaya tambahan.

Dari sisi sumber daya manusia, penguatan manajemen kinerja melalui sistem SAKIP meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Meski demikian, kebutuhan tenaga teknis khusus, terutama pada bidang tata ruang dan pengawasan bangunan, masih menjadi tantangan.

Pada periode 2025–2029, efisiensi diarahkan pada digitalisasi sistem perizinan dan perencanaan, integrasi data berbasis dashboard kinerja, serta penguatan monitoring berbasis teknologi informasi.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang atau Menghambat

Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Pengelolaan dan Pengembangan SPAM, serta Pengembangan Jasa Konstruksi terbukti menjadi program yang paling konsisten menunjang keberhasilan indikator strategis.

Sebaliknya, Program Penataan Ruang dan Program Penataan Bangunan Gedung memerlukan penguatan struktural dan administratif agar dapat mempercepat capaian indikator. Program Bina Marga juga memerlukan stabilitas pembiayaan untuk menjaga kemandirian jalan secara berkelanjutan.

e. Rencana Tindak Lanjut dan Strategi 2026–2029

Berdasarkan evaluasi dua periode perencanaan tersebut, arah tindak lanjut difokuskan pada:

1. Strategi Percepatan

- Penyusunan roadmap RDTR berbasis kawasan prioritas.
- Digitalisasi sistem PBG dan SLF.
- Skema kolaboratif pengelolaan TPS3R antar desa.
- Preservasi jalan berbasis siklus hidup infrastruktur.

2. Strategi Konsolidasi

- Pemeliharaan rutin irigasi dan drainase.
- Penguatan kualitas layanan SPAM dan sanitasi.
- Monitoring berbasis risiko terhadap dampak perubahan iklim.

3. Strategi Penguatan Tata Kelola

- Penyempurnaan cascading kinerja individu.
- Integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis outcome.
- Pengembangan dashboard monitoring indikator strategis.

- Evaluasi kinerja triwulanan yang lebih terukur.

III.3 Prestasi Kinerja Lainnya

Subbab ini menyajikan perbandingan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dengan capaian kinerja pada tingkat nasional maupun standar umum yang berlaku. Perbandingan ini dimaksudkan untuk mengetahui posisi (level) kinerja perangkat daerah dalam konteks yang lebih luas, sekaligus memberikan gambaran objektif mengenai daya saing kinerja pelayanan infrastruktur dan tata kelola yang telah dicapai.

Selain capaian indikator sektoral infrastruktur, peningkatan kualitas tata kelola kinerja perangkat daerah merupakan salah satu prestasi penting yang dicapai Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto dalam periode perencanaan 2021–2026 dan menjadi fondasi kuat memasuki Renstra 2025–2029.

Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), nilai SAKIP Dinas PUPR menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada akhir periode Renstra 2021–2026, nilai SAKIP tercatat sebesar 82,15, dan pada Tahun 2025 meningkat menjadi 83,54. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025–2029 sebesar 84,00, maka tingkat kemajuan telah mencapai 99,45%, yang menunjukkan posisi sangat mendekati target akhir periode.

Dalam rangka memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi dan tingkat kemajuan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto, diperlukan analisis komparatif terhadap capaian indikator yang relevan dengan target Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Perbandingan ini penting untuk menilai sejauh mana kontribusi kinerja daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan provinsi, khususnya pada sektor infrastruktur, layanan dasar, dan tata kelola pemerintahan.

Analisis perbandingan dilakukan terhadap indikator-indikator strategis yang memiliki keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, serta indikator kinerja kementerian teknis terkait. Dengan demikian, capaian perangkat daerah tidak hanya dinilai dari perspektif internal Renstra Kabupaten, tetapi juga dalam konteks integrasi pembangunan lintas level pemerintahan.

Secara umum, sebagian besar indikator layanan dasar seperti akses air minum, sanitasi, pengelolaan sumber daya air, dan kemantapan jalan merupakan indikator yang juga menjadi prioritas nasional. Oleh karena itu, capaian Kabupaten Mojokerto

perlu dianalisis dalam kerangka kontribusi terhadap target makro sektor infrastruktur pada tingkat provinsi dan nasional.

Selain itu, perbandingan ini juga bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi kesenjangan (gap) capaian daerah terhadap target yang lebih tinggi.
- Menilai tingkat keselarasan kebijakan dan efektivitas intervensi program.
- Menentukan area yang memerlukan percepatan atau penguatan kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat.
- Mengukur daya saing dan posisi relatif Kabupaten Mojokerto dalam pembangunan infrastruktur regional.

Hasil analisis komparatif ini diharapkan dapat memberikan dasar yang objektif dalam penyusunan strategi peningkatan kinerja pada periode Renstra 2025–2029, serta memperkuat argumentasi bahwa kebijakan dan program yang dijalankan telah selaras dengan arah pembangunan nasional dan provinsi.

Berikut disajikan tabel perbandingan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dengan capaian Provinsi dan Pemerintah Pusat pada indikator-indikator yang sejenis.

Tabel III.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Provinsi/Pusat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi DPUPR Kab. Mojokerto	Pembanding Provinsi/Pusat
1	Meningkatnya pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	100,00%	Data nasional tidak terstandar kab/kota
2	Meningkatnya akses terhadap air minum (SPAM)	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	96,32%	Nasional ± 91,72%
3	Meningkatnya penyediaan sarana pengelolaan sampah	Persentase desa tersedia TPS/TPST/TPS3R	10,90%	Nasional belum tersedia indikator sejenis
4	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase rumah tangga layanan air limbah layak	99,91%	Nasional ± 80–90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi DPUPR Kab. Mojokerto	Pembandingan Provinsi/Pusat
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan banjir	Persentase kawasan dengan drainase kondisi baik	21,05%	Tidak tersedia data nasional setara
6	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio bangunan gedung laik fungsi	11,00%	Belum ada standar nasional kuantitatif
7	Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	84,89%	Rata-rata kabupaten nasional $\pm$ 75–80%
8	Meningkatnya kapasitas jasa konstruksi	Rasio tenaga konstruksi bersertifikat	60,70%	Nasional masih < 60%
9	Meningkatnya Kesesuaian pembangunan dengan RTRW	Persentase pembangunan selaras RTRW	100,00%	Nasional belum seluruh daerah 100%
10	Meningkatnya Kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,54 (A-)	Rata-rata nasional PD: BB–A

Berdasarkan hasil perbandingan kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto berada pada level baik hingga sangat baik, bahkan pada beberapa indikator melampaui capaian nasional.

Pada sektor air minum, capaian akses sebesar 96,32% lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang masih berada di kisaran 91–92%. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas layanan SPAM melalui optimalisasi sistem eksisting serta pembangunan sarana air minum berbasis masyarakat. Kondisi serupa juga terlihat pada indikator air limbah domestik, di mana cakupan layanan mencapai 99,91%, jauh melampaui rerata nasional yang masih berada pada kisaran 80–90%, sehingga mencerminkan tingkat pelayanan sanitasi yang sangat baik.

Pada sektor sumber daya air, capaian rasio daerah irigasi terlayani sebesar 100% menunjukkan bahwa seluruh daerah irigasi kewenangan kabupaten telah terlayani jaringan irigasi. Meskipun tidak terdapat pembandingan nasional yang setara, capaian ini mencerminkan kinerja optimal dalam pengelolaan infrastruktur irigasi daerah.

Sementara itu, indikator kemantapan jalan kabupaten sebesar 84,89% menunjukkan posisi Kabupaten Mojokerto berada di atas rata-rata nasional kabupaten/kota yang umumnya masih berada pada kisaran 75–80%. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang dilakukan telah berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dari sisi tata kelola, Nilai SAKIP sebesar 83,54 (kategori A-) menempatkan Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto pada level kinerja yang lebih baik dibandingkan sebagian besar perangkat daerah secara nasional yang masih berada pada kategori BB. Capaian ini mencerminkan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, serta pelaporan dan evaluasi yang semakin berkualitas.

Namun demikian, beberapa indikator seperti pengelolaan sampah, drainase lingkungan, dan bangunan gedung laik fungsi masih menunjukkan capaian yang relatif rendah apabila dilihat dari kebutuhan ideal pelayanan. Hal ini bukan menunjukkan kinerja yang buruk, melainkan dipengaruhi oleh luasnya kebutuhan layanan, keterbatasan anggaran, serta kewenangan lintas sektor yang memerlukan kolaborasi dengan perangkat daerah lain.

Perbandingan ini menegaskan bahwa Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto memiliki daya saing kinerja yang kuat, dengan beberapa indikator strategis telah melampaui capaian nasional, sekaligus memberikan dasar yang objektif untuk perumusan langkah peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Selain perbandingan dengan provinsi/pusat berikut kami sajikan perbandingan kinerja SPM (Standar Pelayanan Minimal) Urusan Pekerjaan Umum sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan SPM

No	Jenis layanan SPM		Indikator Kinerja	Target SPM	Realisasi	Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari		Jumlah Yang Harus Dilayani	2124	2124	100%
			PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan	2124	2124	
			Jaringan Perpipaan			
			Kuantitas SPAM			
		1	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	531	531	

No	Jenis layanan SPM		Indikator Kinerja	Target SPM	Realisasi	Capaian
			Kualitas SPAM			
		2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	531	531	
			Bukan Jaringan Perpipaan			
			Kuantitas SPAM			
		1	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	0	0	
			Kualitas SPAM			
		2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	0	0	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik		Jumlah Yang Harus Dilayani	620	620	100%
			PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan	620	620	
			SPALD Kabupaten/Kota			
		1	KUANTITAS SPALD			
			a. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	155	155	
		2	KUALITAS SPALD			
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)			
			a. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	155	155	
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)			

No	Jenis layanan SPM	Indikator Kinerja	Target SPM	Realisasi	Capaian
		b. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan ≥ 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	0	0	
		c. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	155	155	

Perbandingan Kinerja SPM (Standar Pelayanan Minimal) Urusan Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto juga menyajikan perbandingan capaian kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pelayanan dasar. SPM digunakan sebagai tolok ukur minimum yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar masyarakat terhadap layanan infrastruktur.

Berdasarkan data SPM Tahun 2025, capaian pada jenis layanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari menunjukkan kinerja yang optimal dan memenuhi standar sepenuhnya. Dari jumlah target penerima layanan sebanyak 2.124 rumah tangga, seluruhnya telah berhasil dilayani, sehingga capaian SPM mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas PUPR telah mampu memenuhi kewajiban pelayanan dasar air minum bagi masyarakat sasaran sesuai standar yang ditetapkan.

Secara lebih rinci, pada layanan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, seluruh target rumah tangga sebanyak 531 telah memperoleh akses air minum yang memenuhi kebutuhan pokok minimal sebesar 60 liter/orang/hari serta memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai Permenkes Nomor 2 Tahun 2023, dengan capaian 100%. Sementara itu, untuk layanan air minum bukan jaringan perpipaan, tidak terdapat target maupun realisasi pada tahun

pelaporan, sehingga tidak mempengaruhi perhitungan capaian SPM secara keseluruhan.

Selanjutnya, pada jenis layanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik, kinerja Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto juga menunjukkan capaian yang sangat baik. Dari jumlah target penerima layanan sebanyak 620 rumah tangga, seluruhnya telah dilayani, sehingga capaian SPM kembali mencapai 100%. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjamin akses masyarakat terhadap sistem pengolahan air limbah domestik yang aman dan layak.

Pemenuhan standar tersebut terlihat pada indikator kuantitas SPALD, di mana seluruh rumah tangga sasaran telah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik. Dari sisi kualitas layanan, baik pada sistem SPALD Terpusat (SPALD-T) maupun layanan akses layak di wilayah perdesaan dengan kepadatan rendah, seluruh target yang ditetapkan telah tercapai. Adapun indikator SPALD Setempat (SPALD-S) dengan kriteria tertentu tidak memiliki target pada tahun pelaporan sehingga tidak mempengaruhi capaian keseluruhan.

Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Mojokerto yang mencapai 100% pada seluruh jenis layanan yang ditargetkan menunjukkan bahwa kinerja Dinas PUPR tidak hanya memenuhi standar nasional minimum, tetapi juga mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjamin pelayanan dasar yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Capaian ini sekaligus memperkuat posisi kinerja Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto apabila dibandingkan dengan daerah lain yang pada umumnya masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan SPM secara penuh.

III.4 Akuntabilitas Anggaran

Pengelolaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan.

Realisasi anggaran Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar program memiliki tingkat serapan yang tinggi dan proporsional terhadap capaian kinerja. Pada beberapa program, realisasi anggaran belum mencapai 100 persen, namun capaian kinerja tetap dapat direalisasikan sesuai target atau mendekati target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tidak semata-mata berorientasi

pada tingkat penyerapan, melainkan lebih menekankan pada pencapaian hasil (result oriented), sejalan dengan arah kebijakan SAKIP.

Keterkaitan Akuntabilitas Anggaran dengan Komponen Penilaian SAKIP

Ditinjau dari komponen penilaian SAKIP, pengelolaan anggaran Tahun 2025 telah mendukung beberapa aspek utama, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Anggaran disusun berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang jelas, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan organisasi. Hal ini memperkuat konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

2. Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja diukur secara periodik dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Perbandingan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja menjadi dasar untuk menilai efektivitas pelaksanaan program.

3. Pelaporan Kinerja

Informasi realisasi anggaran dan capaian kinerja disajikan secara transparan dan dapat ditelusuri, sehingga memudahkan proses reviu dan evaluasi oleh APIP maupun pihak eksternal.

4. Evaluasi Kinerja

Selisih antara pagu dan realisasi anggaran dianalisis sebagai bagian dari evaluasi kinerja, dengan menekankan pada penyebab yang bersifat teknis dan efisiensi pelaksanaan, tanpa mengurangi pencapaian output dan outcome.

Keterkaitan yang kuat antara keempat komponen tersebut menjadi faktor pendukung dalam pencapaian nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 83,54, yang menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berkelanjutan.

Penerapan Prinsip Value for Money

Pelaksanaan anggaran Tahun 2025 juga mencerminkan penerapan prinsip value for money, yang meliputi:

- Economy, melalui pengadaan barang dan jasa yang menghasilkan harga lebih efisien dibandingkan pagu anggaran;

- Efficiency, melalui optimalisasi volume dan metode pelaksanaan kegiatan sehingga output tetap tercapai dengan biaya yang lebih rendah;
- Effectiveness, melalui tercapainya sasaran kinerja sesuai target yang ditetapkan.

Dengan demikian, selisih antara pagu dan realisasi anggaran tidak serta-merta menunjukkan rendahnya kinerja, tetapi justru menjadi indikasi adanya efisiensi belanja sepanjang output dan outcome kegiatan tetap tercapai. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang menekankan manfaat dan hasil nyata bagi masyarakat.

Tahun anggaran 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 252.902.576.872,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 221.980.403.363,36 atau 87,77% dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.7 Realisasi Anggaran Tahun 2025

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.418.573.960,00	24.270.854.234,00	95,48%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	18.517.314.350,00	11.603.192.076,00	62,66%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.120.042.593,00	1.084.179.029,00	96,80%
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2.198.515.000,00	2.130.968.783,00	96,93%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.319.692.525,00	2.280.096.063,00	98,29%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	25.035.722.000,00	22.591.202.895,00	90,24%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	23.057.180.100,00	19.517.802.973,80	84,65%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	240.804.000,00	214.223.473,00	88,96%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	151.197.264.244,00	134.635.811.278,36	89,05%
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.195.369.100,00	1.142.121.907,20	95,55%

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.602.099.000,00	2.509.950.651,00	96,46%
TOTAL	252.902.576.872,00	221.980.403.363,36	87,77%

Berdasarkan capaian program tersebut, dapat dilihat perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi keuangan sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Perbandingan ini dimaksudkan untuk menunjukkan sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan dan direalisasikan mampu mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja tahun berjalan.

Tabel III.8 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Program Penunjang	KINERJA			ANGGARAN			Efisiensi
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	100,00 %	100,00%	100,00%	18.517.314.350,00	11.603.192.076,00	62,66%	37,34%
Meningkatnya akses terhadap air minum (SPAM)	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum (SPAM)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	95,50%	96,32%	100,86%	1.120.042.593,00	1.084.179.029,00	96,80%	4,06%
Meningkatnya penyediaan sarana pengelolaan sampah yang sesuai ketentuan	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3 R	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	10,00%	10,90%	109,00%	2.198.515.000,00	2.130.968.783,00	96,93%	12,07%
Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	100,00 %	99,91%	99,91%	2.319.692.525,00	2.280.096.063,00	98,29%	1,62%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Program Penunjang	KINERJA			ANGGARAN			Efisiensi
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya kualitas pengelolaan banjir di perkotaan dan lingkungan	Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase dengan kondisi baik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	21,00%	21,05%	100,24%	25.035.722.000,00	22.591.202.895,00	90,24%	10,00%
Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio Bangunan Gedung kondisi baik dan laik fungsi	1. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 2. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	11,00%	11,00%	100,00%	23.297.984.100,00	19.732.026.446,80	84,69%	15,31%
Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	84,00%	84,89%	101,06%	151.197.264.244,00	134.635.811.278,36	89,05%	12,01%
Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator /teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	52,00%	60,70%	116,73%	1.195.369.100,00	1.142.121.907,20	95,55%	21,19%
Meningkatnya kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang	Persentase pembangunan daerah yang selaras dengan RTRW	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	100,00%	100,00%	100,00%	2.602.099.000,00	2.509.950.651,00	96,46%	3,54%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Program Penunjang	KINERJA			ANGGARAN			Efisiensi
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase wilayah kecamatan yang telah dilengkapi dengan RDTR		5,56%	5,56%	100,00%				
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	82,5	83,54	101,26%	25.418.573.960,00	24.270.854.234,00	95,48%	21,77%
			RATA - RATA CAPAIAN		102,78%	TOTAL CAPAIAN		87,77%	15,01%

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja dengan anggaran, dapat dilihat bahwa secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan tingkat efisiensi anggaran yang relatif baik. *Rata-rata capaian kinerja* sasaran strategis mencapai *102,78 persen*, sementara total realisasi keuangan berada pada *87,77 persen* dari total alokasi anggaran, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi anggaran rata-rata sebesar 15,01 persen.

Pada Sasaran Meningkatnya pengelolaan infrastruktur sumber daya air, indikator rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi berhasil dipertahankan pada capaian 100 persen, meskipun realisasi anggaran hanya sebesar 62,66 persen dari alokasi Rp18,52 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kegiatan irigasi dilakukan secara efektif melalui optimalisasi jaringan eksisting dan prioritas kegiatan pemeliharaan, sehingga target kinerja dapat dicapai dengan efisiensi anggaran sebesar 37,34 persen.

Selanjutnya, pada sasaran peningkatan akses air minum (SPAM) dan pengelolaan persampahan, capaian kinerja masing-masing mencapai 100,86 persen dan 109 persen, dengan realisasi anggaran di bawah 97 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa program pengembangan sistem penyediaan air minum serta persampahan regional mampu menghasilkan output dan outcome yang melebihi target, meskipun terdapat penghematan anggaran sebagai hasil dari perencanaan teknis yang lebih presisi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.

Pada sasaran pengelolaan air limbah domestik, capaian kinerja tercatat sebesar 99,91 persen dengan tingkat serapan anggaran 98,29 persen. Kesesuaian antara capaian kinerja dan realisasi anggaran ini menunjukkan bahwa program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dilaksanakan secara proporsional sesuai kebutuhan riil di lapangan, dengan efisiensi anggaran yang tetap terjaga.

Sasaran peningkatan kualitas drainase perkotaan, penataan bangunan gedung, serta kemantapan jalan kabupaten juga menunjukkan kinerja yang melampaui atau mendekati target, dengan capaian kinerja masing-masing sebesar 100,24 persen, 100 persen, dan 101,06 persen. Di sisi lain, realisasi anggaran berada pada kisaran 84,69 persen hingga 90,24 persen, yang mengindikasikan adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas hasil pembangunan infrastruktur.

Capaian paling signifikan terlihat pada sasaran peningkatan kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi, di mana rasio tenaga kerja bersertifikat mencapai 116,73 persen dari target, sementara realisasi anggaran sebesar 95,55 persen. Hal ini

menunjukkan bahwa program pengembangan jasa konstruksi mampu memberikan dampak kinerja yang tinggi dengan pemanfaatan anggaran yang optimal.

Pada sasaran kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang, indikator keselarasan pembangunan terhadap RTRW tercapai 100 persen dengan realisasi anggaran 96,46 persen, mencerminkan konsistensi antara kebijakan tata ruang dan implementasi pembangunan daerah. Sementara itu, indikator RDTR masih menunjukkan capaian terbatas secara kuantitatif, namun telah memenuhi target tahunan yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja.

Terakhir, pada sasaran peningkatan kualitas tata kelola penunjang kinerja perangkat daerah, nilai SAKIP Perangkat Daerah mencapai 83,54, atau 101,26 persen dari target, dengan realisasi anggaran 95,48 persen. Capaian ini menegaskan bahwa pengelolaan anggaran penunjang telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja, sejalan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas (value for money).

Perbandingan capaian kinerja dan anggaran ini menunjukkan bahwa DPUPR Kabupaten Mojokerto telah mampu mengelola sumber daya keuangan secara efisien untuk menghasilkan capaian kinerja yang optimal, serta mendukung penguatan implementasi SAKIP dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, evaluasi capaian indikator strategis, serta analisis keterkaitan antara kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto telah menunjukkan peningkatan akuntabilitas kinerja dan penerapan prinsip value for money secara konsisten, sebagaimana tercermin dalam capaian SAKIP dan efisiensi penggunaan anggaran.

1. Capaian SAKIP dan Akuntabilitas Kinerja

- Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 mencapai 83,54, atau 101,26% dari target Renstra, yang menunjukkan bahwa sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja telah berjalan efektif dan terintegrasi.
- Capaian tersebut mencerminkan semakin kuatnya keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan, sehingga kinerja yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi berorientasi pada hasil (outcome).

2. Capaian Kinerja dan Efektivitas Program

- Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis mencapai 102,78%, menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja berhasil memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan.
- Capaian tersebut antara lain terlihat pada indikator Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten, Rasio Tenaga Jasa Konstruksi Bersertifikat, serta penyediaan sarana sanitasi dan air minum, yang secara langsung mendukung peningkatan pelayanan dasar dan kualitas infrastruktur daerah.

3. Efisiensi Anggaran dan Penerapan Value for Money

- Realisasi anggaran Tahun 2025 mencapai 87,77%, dengan capaian kinerja yang relatif lebih tinggi dibandingkan serapan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah memenuhi prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.
- Efisiensi anggaran yang terjadi pada beberapa program tidak mengurangi capaian kinerja, melainkan mencerminkan optimalisasi perencanaan,

pengendalian biaya, serta ketepatan sasaran kegiatan. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan mampu memberikan nilai manfaat (value) yang sepadan bagi masyarakat.

4. Keberhasilan dan Tantangan

- Keberhasilan kinerja didukung oleh penguatan perencanaan berbasis kinerja, konsistensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta peningkatan koordinasi lintas bidang.
- Adapun tantangan yang masih dihadapi meliputi kompleksitas teknis pekerjaan infrastruktur, keterbatasan waktu pelaksanaan, serta kebutuhan penyesuaian target pada beberapa indikator agar semakin adaptif terhadap kondisi riil di lapangan.

B. Langkah Perbaikan

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian SAKIP serta memperkuat penerapan prinsip value for money pada tahun-tahun berikutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto akan melaksanakan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Penguatan Implementasi SAKIP Berbasis Outcome

- Menajamkan indikator kinerja agar lebih berorientasi pada manfaat dan dampak pembangunan, bukan hanya output fisik.
- Memastikan keterkaitan yang kuat antara sasaran strategis, program, kegiatan, dan anggaran dalam seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran.

2. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran

- Meningkatkan ketepatan alokasi anggaran pada program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- Mengarahkan efisiensi anggaran untuk mendukung kegiatan strategis tanpa menurunkan kualitas capaian kinerja.

3. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja

- Memperkuat pengawasan internal dan evaluasi berbasis hasil untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
- Menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan perencanaan pada tahun berikutnya.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

- Melanjutkan peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur, khususnya pada bidang teknis dan jasa konstruksi, guna mendukung kualitas pelaksanaan program secara berkelanjutan.

5. Penguatan Sinergi dan Koordinasi

- Meningkatkan koordinasi antar bidang dan dengan perangkat daerah terkait agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur berjalan selaras, efisien, dan sesuai dengan rencana tata ruang.

Demikian laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban perangkat daerah atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang objektif bagi pemangku kepentingan, serta menjadi dasar dalam peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Komitmen terhadap penerapan SAKIP yang berkualitas dan pengelolaan anggaran berbasis value for money akan terus dijaga dan ditingkatkan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Mojokerto, 02 Februari 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO



YUNI LAILI FAIZAH, S.T., M.E.
NIP 197706072001122005



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025.
2. Perjanjian Kinerja P APBD Tahun 2025.
3. Data dukung lainnya sesuai kebutuhan (piagam penghargaan, dokumentasi kegiatan, tabel data pendukung, dll)



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Rinaldi Rizal Sabirin, ST., M.BA

Jabatan: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albarraa

Jabatan: Bupati Mojokerto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 13 Maret 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto

Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Mojokerto

Ir. Rinaldi Rizal Sabirin, ST., M.BA.
Pembina Tingkat I/ IVb
NIP 197910102009011011

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO**

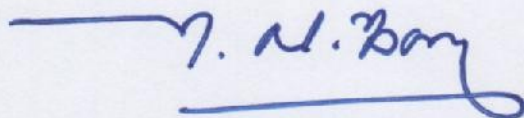
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	81%
2	Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%
3	Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	95,50%
4	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	10%
5	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%
6	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase	21%
7	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio kepatuhan PBG dan SLF	48%
8	Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	84%
9	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator /teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	52%
10	Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	100%

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,50 (A)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	88,50%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	83,5 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 25.772.804.560,00	APBD 2025
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 20.125.038.750,00	APBD, DAK 2025
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 1.020.000.000,00	APBD 2025
4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp. 2.225.382.000,00	APBD, DAK 2025
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 2.313.967.925,00	APBD 2025
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 23.773.822.000,00	APBD 2025
7	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 12.295.180.600,00	APBD 2025
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 300.000.000,00	APBD 2025
9	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 121.619.984.805,00	APBD 2025
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 1.320.000.000,00	APBD 2025
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 2.800.000.000,00	APBD 2025

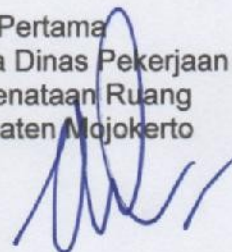
Mojokerto, 13 Maret 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto



Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Mojokerto



Ir. Rinaldi Rizal Sabirin, ST., M.BA.
Pembina Tingkat I/ IVb
NIP 197910102009011011



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anik Mutammima Kurniawati, S.T.,M.Eng

Jabatan: Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albarraa

Jabatan: Bupati Mojokerto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto

Pihak Pertama
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Mojokerto

Muhammad Albarraa

Anik Mutammima Kurniawati, S.T.,M.Eng
Pembina Tingkat I/ IVb
NIP 198002042005012010

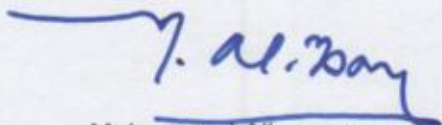
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	100%
2	Meningkatnya Akses Terhadap Air Minum (SPAM)	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air minum (SPAM)	95,5%
3	Meningkatnya Penyediaan Sarana Pengelolaan Sampah yang Sesuai Ketentuan	Persentase Desa di Wilayah Kabupaten Tersedia TPS/TPST/TPS3R	10%
4	Meningkatnya Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air limbah Domestik	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Banjir di Perkotaan dan Lingkungan	Persentase Perkotaan dan Lingkungan yang Dilengkapi Sistem Drainase dengan Kondisi Baik	21%
6	Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Gedung Kondisi Baik dan Laik Fungsi	11%
7	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	84%
8	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	52%
9	Meningkatnya Kesesuaian Pembangunan Infrastruktur dengan Rencana Tata ruang	Persentase Pembangunan Daerah yang Selaras dengan RTRW	100%
		Persentase Wilayah Kecamatan yang Telah dilengkapi dengan RDTR	5,56%
10	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	83

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 25.418.573.960	PAPBD 2025
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 18.517.314.350	PAPBD, DAK 2025
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 1.120.042.593	PAPBD 2025
4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp 2.198.515.000	PAPBD, DAK 2025
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 2.319.692.525	PAPBD 2025
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 25.035.722.000	PAPBD 2025
7	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 23.057.180.100	PAPBD 2025
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp 240.804.000	PAPBD 2025
9	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 151.197.264.244	PAPBD 2025
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 1.195.369.100	PAPBD 2025
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 2.602.099.000	PAPBD 2025

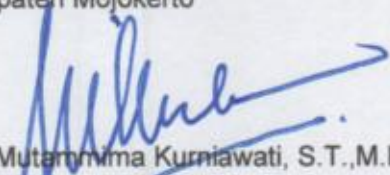
Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto



Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Mojokerto



Anik Mutammima Kurniawati, S.T., M.Eng
Pembina Tingkat I / IVb
NIP 198002042005012010

[illegible]